



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah serta Unit Kerja mandiri dibawahnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2016 – 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 -2025;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 /M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005 Nomor 25 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Kabupaten Semarang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
7. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Daerah Tahun 2016-2021, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
8. Kinerja SKPD adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran SKPD sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra SKPD Tahun 2016-2021, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
10. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
12. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah provinsi, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Daerah Tahun 2016-2021.
13. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD, sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD Tahun 2016-2021.
14. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
15. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
16. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.
17. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada setiap program dan kegiatan.

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU di daerah adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik ; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan SKPD yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PEMILIHAN PENGEMBANGAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

- (1) IKU Pemerintah Daerah dengan IKU SKPD harus selaras dan sinkron.
- (2) IKU untuk setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling sedikit adalah indikator hasil (*outcome*) ; dan
 - b. IKU SKPD paling sedikit adalah indikator keluaran (*output*).

Pasal 4

Pemilihan dan penetapan IKU harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja; dan
- d. kebutuhan data statistik pemerintah;

BAB III

PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 6

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah dan SKPD sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD dan Renstra SKPD harus dinyatakan dengan IKU.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan SKPD perlu melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan singkat dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan dan informasi lainnya.

BAB V

PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja.
- (2) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU kedalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
- (3) Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati Semarang ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Semarang Nomor 061/0094/2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati Semarang ini mulai berlaku sejak Januari 2016.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29-12-2016

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 29-12-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 73

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR **73** TAHUN 2016
 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2016 - 2021

URUSAN PEMERINTAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 URUSAN : **PENDIDIKAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2 Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Kreatif, Berbudaya, Berkarakter dan Menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi (sesuai dengan Nawacita butir Kelima dan Keenam Meningkatkan kualitas hidup Manusia serta meningkatkan produktifitas Masyarakat dan daya Saing dengan daerah Lain)	Angka Partisipasi Sekolah					Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah atau akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah Formulasi APS (7-12) = {(Jumlah penduduk berumur 7-12 tahun yang masih sekolah dibagi Jumlah penduduk umur 7-12 tahun) dikali 100 } APS(13-15) = {(Jumlah penduduk berumur 13-15 tahun yang masih sekolah dibagi Jumlah penduduk umur 13-15 tahun) dikali 100} APS (16-18)= {(Jumlah penduduk berumur 16-18 tahun yang masih sekolah dibagi Jumlah penduduk umur 16-18 tahun) dikali 100} Keterangan -
		Prosentase Tingkat kelulusan					Alasan pemilihan indikator Indikator untuk mengukur capaian sasaran pembangunan pendidikan sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada penjaminan mutu layanan Pendidikan di Kabupaten Semarang Formulasi : Jumlah lulusan (n1 atau 2 atau,3) dibagi Jumlah siswa tingkat tertinggi (n1 atau 2 atau,3) dikalikan 100 Keterangan : (n) dan (n1) n1 untuk peserta didik sekolah SD n2 untuk peserta didik sekolah SLTP n3 untuk peserta didik sekolah SLTA
				1 Meningkatnya akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan			Angka Partisipasi Kasar (%)

				<p>APK SLTA = ((Jumlah penduduk yang sekolah di SLTA dibagi Jumlah penduduk umur 16–18 tahun) dikali 100)</p> <p>Keterangan -</p>
			Angka Partisipasi Murni (%)	<p>Alasan pemilihan indikator Indikator yang mengukur seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya</p> <p>Formulasi APM SD = ((Jumlah penduduk umur 7–12 yang sekolah di SD dibagi Jumlah penduduk umur 7–12 tahun) dikali 100)</p> <p>APM SLTP = ((Jumlah penduduk umur 13–15 yang sekolah di SLTP dibagi Jumlah penduduk umur 13–15 tahun) dikali 100)</p> <p>APM SLTA = ((Jumlah penduduk umur 16–18 yang sekolah di SLTA dibagi Jumlah penduduk umur 16–18 tahun) dikali 100)</p> <p>Keterangan -</p>
			2 meningkatnya jumlah kualitas sarana prasarana pendidikan baik formal maupun non formal	<p>Prosentase Ruang kelas yang sesuai standar Nasional Pendidikan (%)</p> <p>Alasan pemilihan indikator Indikator yang mengukur tingkat pemenuhan ruang kelas yang layak guna</p> <p>Formulasi jumlah ruang kelas berkondisi baik bagi jumlah keseluruhan kelas dikalikan 100</p> <p>Keterangan -</p>
			3 Tersediannya Tenaga pendidik dan Tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi yang memiliki intelegence quotient, emotional quotient dan spritual quotient	<p>Persentase Guru berpendidikan S1/DIV (%)</p> <p>Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengevaluasi capaian sasaran pembangunan pendidikan terkait peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>Formulasi (Jumlah Guru berpendidikan S1/DIV pada (n1 atau 2 atau,3) dibagi (jumlah Guru (n1 atau 2 atau,3) dikalikan 100</p> <p>Keterangan n untuk sekolah TK n1 untuk sekolah SD n2 untuk sekolah SLTP n3 untuk sekolah SLTA</p>
			4 Tersediannya sekolah sekolah kejuruan yang sinergi den kebutuhan dunia usaha dan dunia industri	<p>Prosentase Tingkat penyerapan Lulusan SMK di bidang Industri (%)</p> <p>Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas lulusan SMK dengan menghitung tingkat penyerapan pada sektor industri</p> <p>Formulasi Jumlah Lulusan SMK yang terserap industri pertahun dibagi Jumlah Lulusan SMK pertahun dikalikan 100</p> <p>Keterangan</p>

URUSAN : **KESEHATAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 Meningkatkan Derajat keschatan Masyarakat (sesuai dengan Nawa Cita butir Kelima "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia di Kabupaten Semarang)	Angka Harapan Hidup					<p>Alasan pemilihan indikator</p> <p>Indikator ini untuk mengevaluasi kinerja dalam meningkatkan derajat keschatan</p> <p>Formulasi</p> <p>rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.</p> <p>Keterangan</p>
				1 Terpenuhinya jaminan keschatan bagi masyarakat miskin	Persentase pemenuhan pelayanan keschatan masyarakat pertahun (%)		<p>Alasan pemilihan indikator</p> <p>Formulasi</p> <p>Jumlah penduduk yang terlayani oleh fasilitas keschatan dibagi jumlah penduduk keschuruhan dikali 100</p> <p>Keterangan</p>
				2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan keschatan yang berkualitas		Persentase pelayanan keschatan pada rumah sakit	<p>Alasan pemilihan indikator</p> <p>Formulasi</p> <p>Jumlah Pasien yang melakukan pemeriksaan di Rumahsakit tahun (n) dikurangi Jumlah Pasien yang melakukan pemeriksaan di Rumahsakit tahun (n - 1) dibagi Jumlah Pasien yang melakukan pemeriksaan di Rumahsakit tahun (n - 1) dikali 100</p> <p>Keterangan</p>
						Persentase Pelayanan Jaminan Keschatan bagi masyarakat	<p>Alasan pemilihan indikator</p> <p>Formulasi</p> <p>Jumlah Penduduk yang berobat menggunakan jaminan keschatan dibagi jumlah seluruh penduduk dikalikan 100</p> <p>Keterangan</p>
						Indeks penggunaan tempat Tidur (BOR)	<p>Alasan pemilihan indikator</p> <p>Formulasi</p> <p>jumlah hari perawatan dibagi jumlah tempat tidur dikalikan hari perawatan dikalikan 100</p> <p>Keterangan</p>
						Indeks lama hari perawatan (Av Loss)	<p>Alasan pemilihan indikator</p> <p>Formulasi</p> <p>Lama hari rawat pasien yang keluar (hidup+mati)</p> <p>Keterangan</p>

						Indeks Kematian Umum Pasien (GDR)	Alasan pemilihan indikator Formulasi Jumlah Pasien mati seluruhnya dibagi jumlah pasien keluar x 100 Keterangan
						Indeks Tingkat Penggunaan Tempat Tidur dalam satu tahun (BTO)	Alasan pemilihan indikator Formulasi jumlah pasien keluar (hidup +meninggal) dibagi jumlah tempat tidur dalam satu tahun Keterangan
						3 Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan preventif keschatan di masyarakat)	
						4 Meningkatnya sanitasi lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih	Alasan pemilihan indikator Formulasi Keterangan
						5 Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui anak balita serta anak sekolah dasar	Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas kinerja penanganan dan penatalaksanaan gizi buruk pada suatu wilayah kerja pad kurun waktu tertentu Formulasi Jumlah Balita dengan Gizi kurang/buruk dibagi jumlah keseluruhan balita dikalikan 100 Keterangan

URUSAN : **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata seluruh wilayah dengan menekankan pada pembangunan desa (Termaktub dalam nawa cita butir ketiga "Meneruskan pembangunan kabupaten semarang dari	Prosentase Kondisi infrastruktur dalam kondisi baik					Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur kinerja pemenuhan infrastruktur daerah yang berkualitas Formulasi jumlah infrastruktur dalam kondisi baik dibagi jumlah keseluruhan infrastruktur yang sudah terbangun dikalikan 100 Keterangan

pinggiran dengan memperkuat desa ")

						-
				Persentase Sarana prasarana Jalan Kabupaten yang representatif		<p>Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur peningkatan kualitas aksestabilitas wilayah di kabupaten semarang</p> <p>Formulasi Jumlah panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dibagi Jumlah Panjang jalan Kabupaten dikali 100</p> <p>Keterangan</p>
				Persentase Panjang jalan yang kondisi baik		<p>Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur peningkatan kualitas aksestabilitas wilayah di kabupaten semarang</p> <p>Formulasi Jumlah panjang jalan yang terpelihara dibagi jumlah panjang jalan yang rusak dikali 100</p> <p>Keterangan</p>
				Persentase drainase jalan dalam kondisi baik		<p>Alasan pemilihan indikator indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas sarana lingkungan bagi area publik</p> <p>Formulasi Jumlah panjang drainase jalan berfungsi baik dibagi jumlah panjang keseluruhan drainase jalan dikali 100</p> <p>Keterangan</p>
				Persentase Jumlah panjang trotoar jalan dalam kondisi baik		<p>Alasan pemilihan indikator indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas sarana lingkungan bagi area publik</p> <p>Formulasi Jumlah panjang trotoar dalam kondisi baik dibagi jumlah keseluruhan panjang trotoar jalan dikali 100</p> <p>Keterangan</p>
				Jumlah panjang pembangunan jalan baru		<p>Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur peningkatan pemenuhan kualitas aksestabilitas wilayah di kabupaten semarang</p> <p>Formulasi jelas</p> <p>Keterangan</p>
				Persentase Jaringan Penerangan jalan dalam kondisi baik		<p>Alasan pemilihan indikator indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas penerangan bagi area publik</p> <p>Formulasi Jumlah Jaringan Penerangan jalan yang berfungsi dibagi Jumlah Keseluruhan Jaringan Penerangan Jalan dikali 100</p> <p>Keterangan</p>
				Persentase Sarana prasarana jembatan yang representatif		<p>Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur peningkatan kualitas aksestabilitas wilayah di kabupaten semarang</p> <p>Formulasi</p>

		Jumlah jembatan dalam kondisi baik dibagi Jumlah keseluruhan jembatan dikali 100 Keterangan
Persentase jembatan yang terhabilitasi		Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur peningkatan kualitas aksestabilitas wilayah di kabupaten semarang Formulasi Jumlah titik jembatan yang direhabilitasi dibagi jumlah titik jembatan yang rusak dikali 100 Keterangan
Jumlah titik pembangunan jembatan baru		Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat pemenuhan aksestabilitas wilayah di kabupaten semarang Formulasi Jelas Keterangan
Persentase sarana prasarana Gedung dan bangunan milik Pemerintah yang representatif		Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat kelayakan fungsi gedung perkantoran pemerintah kabupaten semarang Formulasi Jumlah Bangunan dalam kondisi baik dibagi Jumlah keseluruhan Bangunan dikali 100 Keterangan
Persentase Bangunan dan gedung pemerintah dalam kondisi baik		Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat kelayakan fungsi gedung perkantoran pemerintah kabupaten semarang Formulasi Jumlah unit bangunan dan gedung pemerintah dalam kondisi baik dibagi Jumlah keseluruhan bangunan dan gedung pemerintah dikali 100 Keterangan
Persentase pembangunan keciptakaryaan		Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat pemenuhan sarana dan prasarana pembangunan gedung perkantoran pemerintah kabupaten semarang Formulasi Jumlah keseluruhan pembangunan gedung dan bangunan baru dibagi jumlah keseluruhan bangunan dikali 100 Keterangan
Persentase kepatuhan Rumah dan Bangunan yang sesuai RDTR		Alasan pemilihan indikator Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pengendalian kebijakan penggunaan lahan bagi perumahan Formulasi Jumlah bangunan Ber IMB dan ITR dibagi Jumlah Keseluruhan Bangunan dikali 100

			Keterangan
	Jumlah Bangunan yang memiliki IMB		<p>Alasan pemilihan indikator Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan legalitas penggunaan lahan sesuai ketentuan penataan ruang</p> <p>Formulasi jelas</p> <p>Keterangan</p>
	Persentase pelanggaran Tata Ruang		<p>Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat pengendalian kebijakan pemanfaatan lahan sesuai peruntukan berdasarkan RTRW</p> <p>Formulasi Jumlah bangunan yang tidak Ber IMB dan ITR dibagi Jumlah Keseluruhan Bangunan dikali 100</p> <p>Keterangan</p>
	Persentase Rehabilitasi gorong gorong/ Drainase		<p>Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat pemeliharaan/ normalisasi fungsi dari aliran gorong gorong/drainase</p> <p>Formulasi Jumlah panjang gorong-gorong dibagi Drainase yang direhabilitasi Jumlah Panjang gorong gorong/Drainase yang rusak dikali 100</p> <p>Keterangan</p>
	Persentase Jaringan Saluran sungai dalam kondisi baik		<p>Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat pemeliharaan/ normalisasi fungsi dari aliran sungai</p> <p>Formulasi Jumlah panjang normalisasi sungai dibagi jumlah panjang jaringan sungai yang alirannya tidak lancar dikali 100</p> <p>Keterangan</p>
2	Tersedianya jaringan irigasi dan sumber sumber air untuk pertanian	Persentase Saluran Pengairan dalam kondisi baik (%)	<p>Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat pemeliharaan dan pemenuhan saluran pengairan bagi pertanian</p> <p>Formulasi Jumlah Panjang saluran pengairan dalam kondisi baik dibagi Jumlah Panjang Keseluruhan saluran Pengairan dikali 100</p> <p>Keterangan</p>
3	Tersedianya prasarana olahraga ,ruang publik dan ruang terbuka hijau di perkotaan	Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (ha)	<p>Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat pemenuhan kualitas dan kuantitas Ruang terbuka hijau dalam peningkatan kelestarian dan fungsi lingkungan hidup</p> <p>Formulasi</p>

Luas Area Terbuka Hijau dibagi Jumlah Luas Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau dikali 100
Keterangan

URUSAN : **PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan						
1	2	3	4	5	6	7	8						
1	6 Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata seluruh wilayah dengan menekankan pada pembangunan desa (Termaktub dalam nawa cita butir ketiga "Meneruskan pembangunan kabupaten semarang dari pinggiran dengan memperkuat desa ")					Persentase peningkatan jalan lingkungan yang tertata	Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penanganan dan penataan wilayah permukiman Formulasi Jumlah panjang jalan lingkungan yang ditingkatkan dibagi jumlah Panjang jalan lingkungan dikali 100 Keterangan -						
						Persentase Sanitasi lingkungan dalam kondisi baik	Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penyediaan sanitasi layak bagi penduduk Formulasi Jumlah Rehabilitasi Sanitasi Lingkungan dibagi Jumlah Keseluruhan sanitasi lingkungan dikali 100 Keterangan -						
						Persentase Rehabilitasi Permukiman kumuh	Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penanganan dan penataan wilayah permukiman Formulasi Jumlah Pemenuhan dan perbaikan sarana prasarana lokasi permukiman dibagi Jumlah permukiman kumuh dikali 100 Keterangan -						
									4 Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai	Pemenuhan ketersediaan sarana air bersih (%)	Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penyediaan air bersih aman bagi penduduk Formulasi Jumlah Pembangunan saluran air bersih dibagi jumlah kebutuhan pembangunan saluran air bersih dikali 100 Keterangan -		
											5 Tersedianya rumah layak huni dan rumah bersanitasi	Persentase permukiman yang layak huni (%)	Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penanganan dan penataan wilayah permukiman Formulasi Jumlah area permukiman yang memiliki sanitasi dibagi Jumlah area keseluruhan Permukiman dikali 100 Keterangan
													Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penanganan dan penataan wilayah permukiman Formulasi Jumlah area permukiman yang memiliki sanitasi dibagi Jumlah area keseluruhan Permukiman dikali 100 Keterangan

				6 Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah	rata rata Sampah yang terolah dengan baik perhari (m ³)		- Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas kinerja penanganan sampah Formulasi Rata Rata Jumlah Pengolahan sampah perhari dibagi Rata Rata Jumlah Produksi sampah perhari dikali 100 Keterangan -
				7 Terpenuhinya kebutuhan energi listrik	Rasio elektrifikasi (%)		Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan dan penyediaan listrik rumah tangga bagi penduduk Formulasi jumlah rumah penduduk yang menggunakan listrik dibagi jumlah total rumah penduduk dikalikan 100 Keterangan -

URUSAN : **KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	5 Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi (Sesuai dengan Nawacita Kedelapan "Menggerakkan revolusi mental dalam setiap gerak pembangunan")			3 Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat ,penegakan keadilan serta supremasi hukum	penurunan jumlah pelanggaran perda (%)		Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur kinerja penegakan peraturan daerah Formulasi Jumlah pelanggaran Perda tahun (n) dikurangi jumlah pelanggaran Perda tahun (n-1) dikali 100 Keterangan -
						Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penanganan dan pengelolaan trantibmas Formulasi Jumlah personil satuan Polisi PP dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000 Penduduk Keterangan -
						Cakupan Penegakan Perda	Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur kinerja penegakan peraturan daerah Formulasi Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dibagi jumlah pelanggaran Perda dikalikan 100 Keterangan -
						Cakupan Patroli	Alasan pemilihan indikator

	petugas Pol PP	Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja pengendalian keamanan oleh petugas Satpol PP
		Formulasi
		Jumlah Patroli Petugas Pol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 jam
		Keterangan
		-
Persentase penurunan pelanggaran terhadap ketertiban umum		Alasan pemilihan indikator
		Indikator ini untuk mengukur kinerja penegakan peraturan daerah
		Formulasi
		Jumlah pelanggaran Perda tahun (n) dikurangi jumlah pelanggaran Perda tahun (n-1) dikali 100
		Keterangan
		-
	Cakupan Rasio Linmas	Alasan pemilihan indikator
		Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penanganan dan pengelolaan trantibmas
		Formulasi
		Jumlah personil satuan Polisi PP dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000 Penduduk
		Keterangan
		-
	Cakupan Petugas Linmas	Alasan pemilihan indikator
		Indikator ini untuk mengukur kinerja penegakan peraturan daerah
		Formulasi
		Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dibagi jumlah pelanggaran Perda dikalikan 100
		Keterangan
		-
	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	Alasan pemilihan indikator
		Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja pengendalian keamanan oleh petugas Satpol PP
		Formulasi
		Jumlah Patroli Petugas Pol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 jam
		Keterangan
		-
	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3	Alasan pemilihan indikator
		Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja pengendalian keamanan oleh petugas Trantib linmas
		Formulasi
		Jumlah Patroli petugas Trantib linmas pemantauan dan penyelesaian pelanggaran Ketertiban dalam 24 jam
		Keterangan
		-
	Cakupan Patroli	Alasan pemilihan indikator

						siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas kinerja pengendalian keamanan oleh petugas Trantib linmas Formulasi Jumlah petugas Trantib linmas pemantauan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam 24 jam Keterangan
--	--	--	--	--	--	--	--

URUSAN : **SOSIAL**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Mewujudkan peran serta dan Kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak hak anak (sesuai dengan nawacita butir ke sembilan "memperteguh kebinekaan dan Memperkuat rstorasi sosial"			2 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup	Persentase penurunan tingkat penyandang masalah sosial (%)		Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi PMKS oleh Pemerintah Daerah Formulasi (Jumlah PMKS Tahun (n-1) dikurangi Jumlah PMKS Tahun (n)) dibagi Jumlah PMKS Tahun (n-1) dikalikan 100 Keterangan -
					Persentase penyandang masalah sosial yang tertangani		Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur tahapan rehabilitasi PMKS oleh Pemerintah Daerah Formulasi Jumlah PMKS yang mendapatkan pembinaan dibagi Jumlah PMKS yang terdata dikalikan 100 Keterangan -
					Persentase Penyandang masalah sosial yang menerima bantuan		Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penanganan awal PMKS oleh pemerintah daerah Formulasi Jumlah PMKS yang menerima bantuan pertahun dibagi Jumlah PMKS yang terdata dikalikan 100 Keterangan -

URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN : **TENAGA KERJA**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Kreatif, Berbudaya, Berkarakter dan Menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi (sesuai dengan Nawacita butir Kelima dan Keenam			5 Tersedianya tenaga kerja terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan serta memiliki daya saing	calon tenaga kerja yang Terampil (%)		Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kapabilitas dan kompetensi tenaga kerja setelah mendapatkan pelatihan kerja Formulasi

Meningkatkan kualitas hidup Manusia serta meningkatkan produktifitas Masyarakat dan daya Saing dengan daerah Lain)	6 Tumbuhnya sikap dan perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja	Tingkat pengangguran terbuka (%)	Jumlah calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat pelatihan kerja pertahun dibagi Jumlah calon tenaga kerja yang terdata dikalikan 100 Keterangan -
			Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penyerapan angkatan kerja pada pasar kerja Formulasi Jumlah pengangguran yang terdata pertahun dibagi Jumlah angkatan kerja yang terdata dikalikan 100 Keterangan -
			Persentase Penduduk Usia Kerja yang bekerja Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat Produktifitas kerja penduduk diatas 15 tahun Formulasi Jumlah Penduduk usia kerja yang bekerja dibagi Penduduk usia Produktif Kerja (15 Tahun - 60 Tahun) dikalikan 100 Keterangan -
			Jumlah calon tenaga kerja yang Terampil Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas pelatihan dalam peningkatan kapabilitas dan kompetensi calon tenaga kerja Formulasi Jumlah tenaga Kerja Yang mendapatkan Pelatihan dibagi Jumlah calon tenaga kerja yang terdata dikalikan 100 Keterangan -
			Persentase serapan tenaga kerja Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan penyediaan lapangan kerja oleh pemerintah daerah Formulasi Jumlah lowongan atau peluang kerja dibagi Jumlah Calon Tenaga Kerja dikali 100 Keterangan -

URUSAN : **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Mewujudkan peran serta dan Kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak hak anak (sesuai dengan nawacita butir ke sembilan "memperteguh kebinnekaan dan	Indeks Pemberdayaan Gender					Alasan pemilihan indikator Indeks komposit yang digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi Formulasi

Memperkuat rstorasi sosial"						IDJ = 1/3 (I par + IDM + 1 Inedis) dimana Ipar = indekketerwakilan di parlemen , IDM = Indeks pengambilan keputusan, linc-dis= indeks distribusi pendapatan
						Keterangan -
		Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan di lembaga pemerintahan				Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi perempuan dalam birokrasi Formulasi Jumlah PNS Perempuan dibagi jumlah PNS kabupaten semarang dikali 100 Keterangan -
		persentase cakupan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak				Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalisme penanganan dan perlindungan terhadap perempuan Formulasi Jumlah Kasus kekerasan yang ditangani dibagi jumlah kasus kekerasan yang terjadi dibagi 100 Keterangan -
	Rasio Kekerasan Dalam rumah tangga					Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kapabilitas dan kompetensi tenaga kerja setelah mendapatkan pelatihan kerja Formulasi Jumlah KDRT Yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun Per 1.000 Rumah Tangga Keterangan -
			3 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap hak hak anak melalui sinergitas pemerintah ,masyarakat dan swasta	Prosentase pemenuhan fasilitas umum untuk anak		Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur tahapan Pengembangan kabupaten Layak Anak Formulasi Jumlah kebutuhan fasum untuk anak yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan fasum untuk anak yang harus terbangun dikali 100 Keterangan -

URUSAN : PANGAN

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3 Meningkatkan Kegiatan Usaha Ekonomi Daerah dengan Memanfaatkan sumber Daya Lokal (sesuai dengan Nawa cita butir Keenam "Meningkatkan produktifitas masyarakat dan			4 Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis ,agroindustri dan agrowisata dalam	Prosentase Ketersediaan pangan		Alasan pemilihan indikator : indikator ini unttuk mengukur jaminan pemenuhan kebutuhan pangan dari sisi jumlah, kualitas ,keragaman dan keamanan yang meliputi ketersediaan aspek produk dan cadangan Formulasi :

	<p>daya saing dengan daerah lain")</p>			<p>rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik sektor pertanian</p>		<p>(Jml produk padi dikali penyusutan) ditambah (jml produk jagung dikali penyusutan) ditambah (Jml produk ubi jalar dikali penyusutan) ditambah (Jml produk ubi kayu dikali penyusutan) dibagi jumlah penduduk dikalikan 1000 kg Keterangan :</p> <p>Prosentase Cadangan Pangan Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur jaminan ketersediaan pangan dari sisi jumlah, kualitas, keragaman dan keamanan pangan Formulasi : (Jumlah Produksi pangan n - Jumlah Produksi pangan n-1)/ Jumlah Produksi pangan n-1 x 100 Keterangan :</p> <p>Angka Kecukupan Gizi Alasan pemilihan indikator : Indikator ini untuk menunjukkan kecukupan gizi yang telah dicapai melalui konsumsi, makanan bagi penduduk/ golongan masyarakat Formulasi : (%Ketersediaan Energi + %Ketersediaan Protein) dibagi 2 Keterangan :</p> <p>Peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Alasan pemilihan indikator : Indikator ini untuk menunjukkan tingkat konsumsi dan ketersediaan gizi pada pola pangan masyarakat Formulasi : Persentase AKG x bobot masing-masing kelompok pangan Keterangan :</p> <p>Prosentase Keamanan Pangan Alasan pemilihan indikator : Formulasi : Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi dibagi Jumlah total sampel pangan yang diperdagang dikali 100 Keterangan :</p> <p>Persentase peningkatan informasi pasokan, harga dan akses Alasan pemilihan indikator : Formulasi : Jml (jml realisasi komoditi dibagi target X 100 %) + (jml lokasi pantauan dibagi target X 100 %) + (jml pantauan dibagi target X 100 %) dibagi 3 Keterangan :</p> <p>Persentase stabilitas harga dan pasokan pangan Alasan pemilihan indikator : Indikator ini untuk mengukur keberhasilan kinerja sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien dalam mewujudkan aksesibilitas pangan yang merata Formulasi : 2 - jml rata2 Standart Dev realisasi / rata2 Standart Dev target X 100 % Keterangan :</p>
--	--	--	--	--	--	---

						Persentase berkurangnya daerah rawan pangan	Alasan pemilihan indikator : Indikator ini untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah kabupaten semarang dalam menangani dan melaksanakan pemerataan distribusi pangan Formulasi : jml daerah rawan - Jml daerah rawan pangan yang sudah ditangani / jml daerah rawan X 100 % Keterangan :
--	--	--	--	--	--	---	---

URUSAN : **PERTANAHAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4 Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan akuntabel (sesuai dengan nawa cita butir ke dua membangun tata kelola pemerintahan bersih,efektif dan terpercaya)			3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah	Prosentase kebijakan penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah diimplementasikan dengan baik		Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur kinerja dari implementasi kebijakan pada urusan pertanahan Formulasi : Jumlah kebijakan pertanahan yang terlaksana dibagi jumlah kebijakan pertanahan yang ditetapkan dikalikan 100 Keterangan :

URUSAN : **LINGKUNGAN HIDUP**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan Sesuai dengan nawa cita kelima "meningkatkan kualitas hidup manusia "	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup					Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Formulasi (Indexs Pencemaran Air Sungai dikali 30%) ditambah (Indexs Pencemaran Udara dikali 30%) ditambah (Indexs Tutupan Hutan dikali 40%) Keterangan -
						Tutupan Hutan	Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi luas hutan primer dan sekunder terhadap luas Formulasi BLH Kabupaten Semarang Keterangan -
						Kualitas Air Sungai	Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi jumlah sampel air dengan nilai indeks pencemaran air Formulasi BLH Kabupaten Semarang

							Keterangan -
						Kualitas Udara	Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur mutu udara ambien pada suatu wilayah Formulasi BLH Kabupaten Semarang Keterangan -
			1 Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pertahun			Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan pembangunan kualitas lingkungan hidup Formulasi IKLH tahun (n) dikurangi IKLH tahun (n-1) Keterangan -

URUSAN : ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan akuntabel (sesuai dengan nawa cita butir ke dua membangun tata kelola pemerintahan bersih,efektif dan terpercaya)	Skor evaluasi SAKIP		1 Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan informasi communication and technology melalui electronic goverment dalam rangka peningkatan kualitas,pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data	Persentase tertib Administrasi kependudukan	Persentase Kepemilikan KK	Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat tertib administrasi kependudukan Formulasi Jumlah Kepala Keluarga yg memiliki KK dibagi Jumlah Kepala Keluarga dikalikan 100 Keterangan -
						Persentase Kepemilikan KTP	Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat tertib administrasi kependudukan Formulasi Jumlah Kepala Keluarga yg memiliki KTP dibagi Jumlah Penduduk Wajib KTP dikalikan 100 Keterangan -
						Persentase perpindahan penduduk masuk (imigrasi)	Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur Tingkat perpindahan penduduk pada wilayah kabupaten semarang Formulasi Jumlah penduduk yang keluar dibagi Jumlah penduduk dikali 100 Keterangan -
						Persentase perpindahan penduduk keluar (emigrasi)	Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur Tingkat perpindahan penduduk pada wilayah kabupaten semarang Formulasi

							Jumlah penduduk yang masuk dibagi Jumlah penduduk dikali 100 Keterangan -
						Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat tertib administrasi pencatatan sipil penduduk Formulasi Jumlah penduduk yang memiliki Akta kelahiran dibagi Jumlah penduduk dikalikan 100 Keterangan -
						Prosentase Kepemilikan Akta Kematian	Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat tertib administrasi pencatatan sipil penduduk Formulasi Jumlah Dokumen Akta kematian yang terbit dibagi Jumlah mortalitas penduduk yang terdata dikalikan 100 Keterangan -
						Prosentase Pertumbuhan Penduduk (Pelaporan)	Alasan pemilihan indikator Indikator yang digunakan untuk mengukur perubahan populasi penduduk Formulasi selisih jumlah kelahiran dengan jumlah kematian ditambah dengan selisih jumlah imigrasi dengan jumlah emigrasi Keterangan -

URUSAN : **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	6 Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata seluruh wilayah dengan menekankan pada pembangunan desa (Termaktub dalam nawa cita butir ketiga "Meneruskan pembangunan kabupaten semarang dari pinggir dengan memperkuat desa ")	Indeks pembangunan Desa					Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat kemandirian desa melalui pemberdayaan sistem pemerintahan dan pengembangan potensi desa Formulasi Jumlah total variabel pembangunan desa dibagi 5 (jumlah variabel pembangunan desa) dikali 100 Keterangan -
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur desa				Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat penataan dan kelayakan infrastruktur perdesaan Formulasi Jumlah infrastruktur desa yang terbangun/jumlah total kebutuhan infrastruktur desa x 100 Keterangan -

			Persentase jalan desa dalam kondisi baik				Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat aksesibilitas desa dalam mendukung peningkatan perekonomian perdesaan Formulasi Jumlah jalan desa dalam kondisi baik/jumlah keseluruhan jalan desa x 100 Keterangan -
			Persentase Peningkatan SDM Aparatur desa				Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat profesionalisme aparatur desa dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Formulasi Jumlah Aparatur desa yang mendapatkan pelatihan/Jumlah keseluruhan aparatur desa x 100 Keterangan -
			Persentase Peningkatan nilai kekayaan aset desa				Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat kapasitas pengelolaan aset desa dalam mendukung pembangunan desa Formulasi Jumlah nilai kekayaan aset desa tahun n - jumlah kekayaan desa tahun n-1 x 100 Keterangan -
			Persentase Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat desa				Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat kemudahan terhadap akses pendidikan dan peningkatan kualitas SDM Masyarakat perdesaan Formulasi Jumlah penduduk desa yang tamat SMA/ Jumlah penduduk desa x 100 Keterangan -

URUSAN : **PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat (sesuai dengan Nawa Cita butir Kelima "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia di Kabupaten Semarang)	Angka Harapan Hidup					Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengevaluasi kinerja dalam meningkatkan derajat kesehatan Formulasi rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Keterangan -
				6 Terwujudnya norma	persentase		Alasan pemilihan indikator

				keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera	kesejahteraan dan ketahanan keluarga (%)		Indikator ini untuk mengukur tingkat kemandirian suatu keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan Formulasi jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 dibagi jumlah seluruh keluarga dikali 100 Keterangan -
						Prosentase Peningkatan Kesejahteraan	Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur peningkatan kemampuan suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup secara layak Formulasi Jumlah Keluarga Sejahtera I (n) -Jumlah Keluarga Sejahtera I (n-1) dibagi Jumlah Keluarga Sejahtera I (n) dikali 100 Keterangan -
					Indeks Jumlah Anak per Kepala Keluarga		Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat keberhasilan program Keluarga berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk Formulasi Jumlah anak dibagi Jumlah KK dikalikan 100 Keterangan -
						Persentase kepesertaan Keluarga Berencana Aktif	Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat keberhasilan program Keluarga berencana dalam mensosialisasikan perencanaan keluarga ideal Formulasi Jumlah PUS yang menjadi peserta KB aktif dibagi jumlah seluruh PUS dikali 100 Keterangan -

URUSAN : **PERHUBUNGAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	6 Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata seluruh wilayah dengan menekankan pada pembangunan desa (Termaktub dalam nawa cita butir ketiga "Meneruskan pembangunan kabupaten semarang dari pinggiran dengan memperkuat desa ")			1 Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata	Tingkat Keselamatan lalu Lintas		Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen lalu lintas dalam mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas pengguna jalan Formulasi Jmlh Korban meninggal dikalikan 10.000 Jumlah Kendaraan (Standar Fatalitas Nasional/Case Fatality rate:3,14) Keterangan -
						Persentase peningkatan kendaraan yang	Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur peningkatan kualitas angkutan orang dan barang yang melayani masyarakat

layak jalan	<p>Formulasi Jumlah Kendaraan lolos uji kir (n) dikurangi jumlah kendaraan lolos uji kir (n-1) dibagi 100</p> <p>Keterangan -</p>
Persentase rambu rambu lalu lintas dalam kondisi baik	<p>Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur peningkatan kualitas sarana dan prasarana manajemen lalu lintas</p> <p>Formulasi jumlah rambu rambu lalu lintas yang berfungsi baik dibagi Jumlah rambu rambu lalu lintas keseluruhan dikali 100</p> <p>Keterangan -</p>
Volume/Jumlah Kendaraan yang melintas(LHR)	<p>Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat kepadatan lalu lintas pengguna jalan sehingga memudahkan rekayasa lalu lintas</p> <p>Formulasi Rata rata Jumlah Kendaraan yang melintas disatu titik dalam satu hari</p> <p>Keterangan -</p>
Persentase pemenuhan kebutuhan rambu lalu lintas	<p>Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendukung keamanan lalu lintas jalan</p> <p>Formulasi Jumlah pengadaan RLL diibagiJumlah Kebutuhan RLL diklai 100</p> <p>Keterangan -</p>
Rasio Ketersediaan fasilitas tempat parkir	<p>Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas penggunaan parkir</p> <p>Formulasi Jumlah fasilitas tempat parkir dibagi Rata rata pengguna layanan parkir perhari</p> <p>Keterangan -</p>
Persentase keterjangkauan alat transportasi umum	<p>Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat keberhasilan program Keluarga berencana dalam mensosialisasikan perencanaan keluarga ideal</p> <p>Formulasi 60 menit dikali kapasitas kendaraan dikali 70 %* dibagi rata jumlah Penumpang perjam (*merupakan rata rata load factor pada trayek reguler dalam kota)</p> <p>Keterangan -</p>
Persentase Fasilitas terminal yang sesuai standar	<p>Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat profesionalitas Pelayanan Penggunan angkutan melalui penyediaan fasilitas dan sarana penunjang pelayanan publik</p>

							Formulasi Jumlah fasilitas terminal yang berkondisi baik dibagi Jumlah fasilitas terminal dikali 100 Keterangan -
					Rata Rata Jumlah angkutan yang masuk terminal perhari		Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat kapasitas terminal terhadap Pelayanan angkutan masal Formulasi Jelas Keterangan -
					Jumlah keseluruhan trayek angkutan		Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat pemenuhan dan aksesibilitas transportasi masal dalam melayani masyarakat Formulasi trayek angkutan yang diijinkan melayani masyarakat Keterangan -
					Persentase angkutan orang yang memiliki ijin jalan		Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat kedisiplinan dan tertib administrasi pelayanan angkutan orang Formulasi Jumlah angkutan orang yang memiliki ijin dibagi Jumlah angkutan orang yang terdata dikalikan 100 Keterangan -
					Persentase angkutan barang yang memiliki ijin jalan		Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat kedisiplinan dan tertib administrasi pelayanan angkutan barang Formulasi Jumlah angkutan barang yang memiliki ijin dibagi Jumlah angkutan barang yang terdata dikalikan 100 Keterangan -

URUSAN : **KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4 Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efisien dan akuntabel (sesuai dengan nawa cita butir ke dua membangun tata kelola pemerintahan bersih,efektif dan terpercaya)			1 Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan informasi communication and technology melalui electronic goverment dalam rangka peningkatan 4 Terciptanya	Persentase Infrastruktur Jaringan yang terkoneksi dengan baik (%) Presentase		Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur tingkat aksestabilitas jaringan komunikasi dan informasi elektronik pada wilayah kabupaten semarang Formulasi : Jumlah titik jaringan internet pemda yang dapat diakses dibagi jumlah titik jaringan internet pemda yang tersedia dikalikan 100 Keterangan : - Alasan pemilihan indikator :

				transparansi dalam pelaksanaan pembangunan	masyarakat yang mengakses media informasi pembangunan daerah (%)		indikator ini untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam peningkatan kapasitas dan keterbukaan informasi terkait pembangunan Kabupaten Semarang Formulasi : Jumlah masyarakat yang menerima informasi dibagi jumlah penduduk kabupaten semarang dikalikan 100 Keterangan : -
				5 Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintah dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data	Persentase Sistem Informasi Yang Dapat Diaplikasikan Secara Optimal (%)		Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur tingkat aksesibilitas jaringan komunikasi dan informasi elektronik pada wilayah kabupaten semarang Formulasi : Jumlah aplikasi sistem informasi pemda yang dapat diakses secara luas dibagi jumlah Aplikasi sistem informasi pemda yang tersedia dikalikan 100 Keterangan : -

URUSAN : KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3 Meningkatkan Kegiatan Usaha Ekonomi Daerah dengan Memanfaatkan sumber Daya Lokal (sesuai dengan Nawa cita butir Keenam "Meningkatkan produktifitas masyarakat dan daya saing dengan daerah lain")			1 Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing	Persentase Peningkatan Nilai Produksi UMKM		Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur tingkat keberhasilan pembinaan dan pendampingan pemerintah kabupaten semarang pada sektor UMKM Formulasi : total nilai produksi UMKM tahun (n) dikurangi total nilai produksi UMKM tahun (n-1) dibagi 100 Keterangan :
						Persentase UMKM yang terbina	Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur tingkat keberhasilan pembinaan pada pelaku usaha pada sektor UMKM Formulasi : Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan pelatihan dibagi Jumlah Total UMKM yang terdata dikali 100 Keterangan :
						Persentase Peningkatan Jumlah UMKM	Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur tingkat keberhasilan pengembangan usaha pada sektor UMKM Formulasi : Jumlah UMKM terdata tahun (n) dikurangi Jumlah UMKM terdata tahun (n-i) dibagi 100 Keterangan :
						Persentase	Alasan pemilihan indikator :

						Peningkatan omzet UMKM	<p>indikator ini untuk mengukur tingkat keberhasilan pendampingan pasca produksi pada sektor UMKM oleh pemerintah kabupaten semarang</p> <p>Formulasi : total Nilai omzet UMKM tahun (n) dikurangi Total nilai omzet UMKM tahun (n-1) dibagi 100</p> <p>Keterangan :</p>
				7	Tumbuhkembangnya kelompok usaha produktif, badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	Persentase peningkatan Koperasi yang berkualitas (%)	<p>Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur tingkat pembinaan dan pengembangan kualitas manajemen usaha koperasi oleh pemerintah kabupaten semarang</p> <p>Formulasi : jumlah koperasi dalam kondisi sehat dibagi jumlah koperasi yang terbina dalam setahun dikalikan 100</p> <p>Keterangan :</p>
						Persentase koperasi yang pengurus mendapatkan peningkatan kompetensi	<p>Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur keberhasilan peningkatan profesionalisme SDM usaha koperasi</p> <p>Formulasi : Jumlah Pengurus koperasi yang mendapatkan pelatihan dibagi Jumlah koperasi aktif dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>
						Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	<p>Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur tingkat pengembangan usaha dan bisnis koperasi oleh pemerintah Kabupaten Semarang</p> <p>Formulasi : Jumlah volume usaha Koperasi tahun (n) dikurangi jumlah Volume usaha koperasi tahun(n-1) dibagi jumlah Volume usaha koperasi tahun (n-1) dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>
						Persentase peningkatan Koperasi berbadan hukum	<p>Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur tingkat profesionalisme manajemen koperasi</p> <p>Formulasi : Persentase dari Selisih koperasi ber BH tahun (n) dengan koperasi ber BH tahun ini tahun (n - 1) /koperasi ber BH tahun ini (n - 1) dikalikan 100</p> <p>Keterangan :</p>

URUSAN : **PENANAMAN MODAL**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5 Menciptakan Iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi (Sesuai dengan	Prosentase Peningkatan Nilai investasi Daerah					<p>Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur peningkatan kinerja pelayanan dan promosi terhadap nilai jual potensi daerah</p>

	Nawacita Kedelapan "Menggerakkan revolusi mental dalam setiap gerak pembangunan")					<p>Formulasi Jumlah Realisasi nilai PMD (n) dikurangi Jumlah Realisasi nilai PMD (n - 1) dibagi Jumlah Realisasi nilai PMD (n - 1) dikalikan 100</p> <p>Keterangan -</p>
					Persentase Peningkatan nilai penanaman modal daerah	<p>Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur peningkatan kinerja pelayanan dan promosi terhadap nilai jual potensi daerah</p> <p>Formulasi Selisih investasi riil (PMA/PMDN) tahun (n) - investasi riil (PMA/PMDN) (n-1) di bagi investasi riil (PMA/PMDN) tahun (n-1) dikali 100</p> <p>Keterangan -</p>
			2 Meningkatnya pelayanan perijinan yang tertib ,tepat waktu,transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat pada SKPD Perijinan		<p>Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan</p> <p>Formulasi Jelas</p> <p>Keterangan -</p>
					Persentase peningkatan jumlah pengajuan ijin unit usaha masyarakat	<p>Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur peningkatan iklim usaha di wilayah kabupaten semarang</p> <p>Formulasi Jumlah pengajuan ijin usaha yang terbit tahun (n) dikurangi Jumlah pengajuan ijin usaha yang terbit tahun (n-1)dibagi umlah pengajuan ijin usaha yang terbit tahun (n-1) dikali 100</p> <p>Keterangan -</p>
					Persentase terjadinya pengaduan masyarakat terhadap ijin yang telah terbit	<p>Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat profesionalisme aparatur bidang perijinan</p> <p>Formulasi Jumlah pengaduan resmi dibagi gugatan terhadap ijin yang telah diterbitkan oleh dinas perijinan dalam satu tahun dibagi jumlah ijin yang telah dikeluarkan dalam satu tahun dikali 100</p> <p>Keterangan -</p>
8	Memfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan Sesuai dengan nawa cita kelima "meningkatkan kualitas hidup manusia "		6 Terkendalinya pemanfaatan lahan untuk pembangunan ekonomi dan investasi daerah yang sesuai dengan	Persentase tingkat kesesuaian Lahan Investasi terhadap Dokumen RTRW (%)		<p>Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat profesionalisme aparatur bidang perijinan</p> <p>Formulasi Jumlah investasi yang melanggar ketentuan RTRW dibagi Jumlah investasi yang mendapatkan ijin dikalikan 100</p> <p>Keterangan -</p>

URUSAN : **KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Kreatif, Berbudaya, Berkarakter dan Menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi (sesuai dengan Nawacita butir Kelima dan Keenam Meningkatkan kualitas hidup Manusia serta meningkatkan produktifitas Masyarakat dan daya Saing dengan daerah Lain)			7 Meningkatnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya, agama, pemuda olah raga dan revolusi mental;	Persentase peningkatan peran serta pemuda perorangan dan organisasi kepemudaan		<p>Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat keberhasilan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan</p> <p>Formulasi Jumlah total anggota pada organisasi pemuda yang berbadan hukum dibagi jumlah penduduk berusi 16 - 30 tahun dibagi 100</p> <p>Keterangan -</p>
					Persentase pemuda dan organisasi kepemudaan yang berprestasi		<p>Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur peningkatan kinerja pembinaan pemuda dan organisasi pemuda oleh pemerintah daerah</p> <p>Formulasi Jumlah Organisasi pemuda yang terbina dibagi jumlah organisasi pemuda yang terdata dibagi 100</p> <p>Keterangan -</p>
					Persentase pemuda yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi		<p>Alasan pemilihan indikator Indikator ini digunakan untuk mengukur peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda</p> <p>Formulasi Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kompetensi dibagi jumlah penduduk usia 16 - 30 tahun dikalikan 100</p> <p>Keterangan -</p>
					Indeks cabang olahraga yang berprestasi		<p>Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur keberhasilan pembinaan dan pendampingan pada olahraga prestasi</p> <p>Formulasi Jumlah cabang yang berprestasi dibagi jumlah keseluruhan cabang yang terbina dibagi 100</p> <p>Keterangan -</p>
					Persentase pemenuhan sarana olahraga bagi cabang olahraga		<p>Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat pemenuhan infrastruktur utama dan penunjang prestasi olahraga</p> <p>Formulasi Jumlah Kebutuhan sarana dan prasarana pada masing cabang yang telah tersedia dibagi jumlah keseluruhan cabang yang terdata dibagi 100</p> <p>Keterangan -</p>
					Persentase ketersediaan pelatih olahraga yang berkualitas		<p>Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur keberhasilan pembinaan dan pendampingan pada olahraga prestasi</p> <p>Formulasi</p>

							Jumlah ketersediaan pelatih olahraga yang bersertifikat dibagi jumlah kebutuhan pelatih pada masing cabang olah raga dkali 100
							Keterangan
							-
					Persentase Atlet yang berprestasi		Alasan pemilihan indikator
							Indikator ini untuk mengukur keberhasilan pembinaan dan pendampingan pada olahraga prestasi
							Formulasi
							Jumlah atlet yang meraih prestasi dibagi jumlah atlet yang mendapatkan pembinaan dikalikan 100
							Keterangan
							-

URUSAN : **STATISTIK**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat (sesuai dengan Nawa Cita butir Kelima "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia di Kabupaten Semarang)	Angka Harapan Hidup					Alasan pemilihan indikator Indikator ini menunjukkan tingkat derajat kesehatan pada masyarakat kabupaten semarang Formulasi statistik Keterangan
			Angka Kematian Bayi (AKB)				Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur keberhasilan program berbagai penyebab kematian maupun program kesehatan ibu dan anak sebab angka kematian bayi ini berkaitan erat dengan tingkat kesehatan ibu dan anak. Formulasi statistik Keterangan
			Angka Kematian Balita (AKABA)				Alasan pemilihan indikator menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor - faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan Formulasi statistik Keterangan
			Angka Kematian Ibu (AKI)				Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur keberhasilan program berbagai penyebab kematian maupun program kesehatan ibu dan anak sebab angka kematian bayi ini berkaitan erat dengan tingkat kesehatan ibu dan anak. Formulasi statistik Keterangan

3	3 Meningkatkan Kegiatan Usaha Ekonomi Daerah dengan Memanfaatkan sumber Daya Lokal (sesuai dengan Nawa cita butir Keenam "Meningkatkan produktifitas masyarakat dan daya saing dengan daerah lain")	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi					Alasan pemilihan indikator : indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang didalamnya terlihat dengan jelas keadaan makro ekonomi suatu daerah dengan pertumbuhan ekonominya, pendapatan perkapita dan berbagai instrumen lainnya Formulasi : (Produk Domestik Regional Bruto tahun (n) - Produk Domestik Regional Bruto tahun (n-1)) dibagi Produk Domestik Regional Bruto tahun (n-1) dikalikan 100 Keterangan :
			Nilai PDRB (Trilyun Rp.)				Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur nilai produksi masyarakat pemerintah kabupaten semarang Formulasi statistik Keterangan
			Laju Inflasi %				Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat kestabilan harga dan biaya hidup sebagai acuan kebijakan keuangan pemerintah kabupaten semarang Formulasi statistik Keterangan
			Pendapatan per kapita (Juta Rp.)				Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur besarnya pendapatan rata-rata penduduk di wilayah pemerintah kabupaten semarang Formulasi statistik Keterangan
			Persentase penduduk miskin (%)				Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur keberhasilan program pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah kabupaten semarang Formulasi statistik Keterangan

URUSAN : **PERSANDIAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4 Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan akuntabel			2 Meningkatnya disiplin ,kompetensi dan profesionalisme		prosentase jenis informasi sandi yang wajib diamankan	Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat profesionalitas pengelolaan informasi yang bersifat rahasia dan persandian

(sesuai dengan nawa cita butir ke dua membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif dan terpercaya)			aparatur pemerintah sehingga responsif terhadap perubahan			Formulasi Jumlah jenis informasi yang berhasil disampaikan dibagi jumlah jenis informasi sandi dikalikan 100 Keterangan -
--	--	--	---	--	--	--

URUSAN : **KEBUDAYAAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3 Meningkatkan Kegiatan Usaha Ekonomi Daerah dengan Memanfaatkan sumber Daya Lokal (sesuai dengan Nawa cita butir Keenam "Meningkatkan produktiofitas masyarakat dan daya saing dengan daerah lain")			6 6. Berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat, budaya lokal, potensi sumber daya alam, serta industri kreatif	Persentase peningkatan Partisipasi masyarakat terhadap pelestarian budaya		Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat keberhasilan pembinaan pelestarian kebudayaan oleh pemerintah kabupaten semarang Formulasi Jumlah lembaga kesenian tahun (n) dikurangi jumlah lembaga kesenian tahun (n-1) dibagi 100 Keterangan
					Persentase lembaga kesenian yang terbina		Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat keberhasilan program pembinaan organisasi kebudayaan oleh pemerintah kabupaten semarang Formulasi Jumlah lembaga kesenian yang mendapatkan pembinaan dibagi Jumlah lembaga kesenian yang terdata dikali 100 Keterangan
					Persentase Lembaga Kesenian yang aktif		Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat keberhasilan program pembinaan organisasi kebudayaan oleh pemerintah kabupaten semarang Formulasi jumlah lembaga kesenian yang aktif mengadakan pertunjukan dibagi Jumlah lembaga kesenian yang terdata dikali 100 Keterangan
					Persentase benda cagar budaya yang terawat		Alasan pemilihan indikator Indikator ini untuk mengukur tingkat profesionalisme pelestarian peninggalan budaya oleh pemerintah kabupaten semarang Formulasi jumlah BCB kondisi baik dibagi jumlah BCB keseluruhan dikali 100 Keterangan

URUSAN : **PERPUSTAKAAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2 Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Kreatif, Berbudaya, Berkarakter dan Menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi (sesuai dengan Nawacita butir Kelima dan Keenam Meningkatkan kualitas hidup Manusia serta meningkatkan produktifitas Masyarakat dan daya Saing dengan daerah Lain)			2 meningkatnya jumlah kualitas sarana prasarana pendidikan baik formal maupun non			
					Persentase pemustaka pertahun		<p>Alasan pemilihan indikator</p> <p>Indikator ini untuk mengukur peningkatan minat baca masyarakat</p> <p>Formulasi</p> <p>Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun dibagi Jumlah Penduduk yang melek huruf dikali 100</p> <p>Keterangan</p>
						persentase perpustakaan yang terbina	<p>Alasan pemilihan indikator</p> <p>Indikator ini untuk mengukur tingkat profesionalisme pelayanan perpustakaan kepada masyarakat</p> <p>Formulasi</p> <p>Jumlah perpustakaan yang terbina dibagi jumlah perpustakaan yang terdata dikali 100</p> <p>Keterangan</p>
						Persentase Peningkatan Pemenuhan sarana keperpustakaan	<p>Alasan pemilihan indikator</p> <p>Indikator ini untuk mengukur tingkat profesionalisme pelayanan perpustakaan kepada masyarakat</p> <p>Formulasi</p> <p>Jumlah Kebutuhan Sarana yang terpenuhi(pemenuhan tahun n-1 ditambah Pemenuhan Tahun n) dibagi Jumlah Kebutuhan dikali 100</p> <p>Keterangan</p>

URUSAN : **KEARSIPAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4 Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan akuntabel (sesuai dengan nawa cita butir ke dua membangun tata kelola pemerintahan bersih,efektif dan terpercaya)			1 Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan informasi communication and technology melalui electronic goverment dalam rangka peningkatkan	Penerapan pengelolaan arsip secara baku		<p>Alasan pemilihan indikator</p> <p>Indikator ini untuk mengukur tingkat profesionalisme pengelolaan dan pelayanan kearsipan pada SKPD</p> <p>Formulasi</p> <p>Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku dibagi Jumlah pengelola Arsip SKPD yang mengikuti Pelatihan dikali 100</p> <p>Keterangan</p> <p>-</p>
						Prosentase	<p>Alasan pemilihan indikator</p>

				<p>o a o</p> <p>kualitas, pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data</p>	<p>pelaksanaan Otomasi Arsip</p>	<p>Indikator ini untuk mengukur tingkat profesionalisme pengelolaan dan pelayanan kearsipan</p> <p>Formulasi</p> <p>Jumlah dokumen arsip yang telah terotomasi dibagi Jumlah Keseluruhan dokumen arsip sampai dengan tahun (n)</p> <p>Keterangan</p> <p>-</p>
					<p>Prosentase SKPD yang menerapkan arsip secara baku</p>	<p>Alasan pemilihan indikator</p> <p>Indikator ini untuk mengukur tingkat profesionalisme pengelolaan dan pelayanan kearsipan pada SKPD</p> <p>Formulasi</p> <p>Jumlah perpustakaan yang terbina dibagi jumlah perpustakaan yang terdata dikali 100</p> <p>Keterangan</p> <p>-</p>

URUSAN PILIHAN

URUSAN : **PARIWISATA**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	14
3	3 Meningkatkan Kegiatan Usaha Ekonomi Daerah dengan Memanfaatkan sumber Daya Lokal (sesuai dengan Nawa cita butir Keenam "Meningkatkan produktiofitas masyarakat dan daya saing dengan daerah lain")	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi					<p>Alasan pemilihan indikator :</p> <p>indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang didalamnya terlihat dengan jelas keadaan makro ekonomi suatu daerah dengan pertumbuhan ekonominya, pendapatan perkapita dan berbagai instrumen lainnya</p> <p>Formulasi :</p> <p>(Produk Domestik Regional Bruto tahun (n) - Produk Domestik Regional Bruto tahun (n-1)) dibagi Produk Domestik Regional Bruto tahun (n-1) dikalikan 100</p> <p>Keterangan :</p>
				6 Berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal	Persentase peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata (%)	Jumlah Target Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor pariwisata (Rp.000)	<p>Alasan pemilihan indikator :</p> <p>indikator ini untuk mengukur peningkatan dan perkembangan sektor pariwisata sebagai komoditas industri</p> <p>Formulasi :</p> <p>Jumlah pendapatan sektor pariwisata daerah n dikurangi Jumlah pendapat pariwisata daerah n-1 dibagi Jumlah pendapatan sektor pariwisata daerah n dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>
						Persentase peningkatan kunjungan wisatawan domestik	<p>Alasan pemilihan indikator :</p> <p>indikator ini untuk mengukur keberhasilan pengelolaan dan promosi komoditas pariwisata</p> <p>Formulasi :</p> <p>Jumlah kunjungan wisatawan domestik tahun n dikurangi Jumlah kunjungan wisatawan domestik tahun n - 1 dibagi Jumlah kunjungan wisatawan domestik tahun n dikali 100</p>

							Keterangan :
						Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur keberhasilan pengelolaan dan promosi komoditas pariwisata Formulasi : Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara tahun n dikurangi Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara tahun n - 1 dibagi Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara tahun n dikali 100 Keterangan :
						Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang pariwisata pada destinasi / obyek wisata	Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur peningkatan fasilitas penunjang sektor pariwisata Formulasi : Jumlah fasilitas penunjang dibagi jumlah kebutuhan fasilitas yang harus dipenuhi dikali 100 Keterangan :
						Persentase pelaku usaha pariwisata yang berdaya saing	Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur peningkatan kapasitas dan profesionalisme pelaku usaha pariwisata Formulasi : Jumlah pelaku usaha pariwisata yang mendapatkan pembinaan usaha dibagi jumlah pelaku usaha pariwisata yang terdata dikali 100 Keterangan :

URUSAN : **PERTANIAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	14
3	3 Meningkatkan Kegiatan Usaha Ekonomi Daerah dengan Memanfaatkan sumber Daya Lokal (sesuai dengan Nawa cita butir Keenam "Meningkatkan produktiofitas masyarakat dan daya saing dengan daerah lain")			3 meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi ,modal dan pemasaran	indeks Nilai Tukar P		Alasan pemilihan indikator : indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan menghitung pendapatan sektor pertanian dari peningkatan harga produsen dari produk pertanian Formulasi : BPS Kabupaten Semarang Keterangan :
				4 Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis ,agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan	Indeks Proiduktifitas hasil pertanian		Alasan pemilihan indikator : Indikator ini untuk mengukur produktifitas lahan pertanian Formulasi : Jumlah produksi pertanian dibagi luas lahan pertanian dikalikan 100 Keterangan :
						Persentase	Alasan pemilihan indikator :

	yang produktif	Formulasi : (Luas lahan perkebunan produktif dibagi Luas keseluruhan lahan perkebunan) dikalikan 100 Keterangan :
Indeks produktifitas hasil hutan		Alasan pemilihan indikator : Formulasi : Jumlah Produksi Hasil Hutan dibagi Luas area hutan dikalikan 100 Keterangan :
	Persentase Peningkatan hasil hutan pertahun	Alasan pemilihan indikator : Formulasi : (Jumlah keseluruhan hasil Hutan tahun (n) dikurangi Jumlah keseluruhan hasil Hutan tahun (n-1)) dibagi keseluruhan Hasil Hutan (n-1) dikalikan 100 Keterangan :
	Persentase Luas hutan rakyat yang produktif	Alasan pemilihan indikator : Formulasi : (Luas Hutan Rakyat produktif dibagi luas keseluruhan hutan rakyat) dikalikan 100 Keterangan :
Persentase Pemenuhan produksi Hasil peternakan terhadap Kebutuhan masyarakat		Alasan pemilihan indikator : Formulasi : (Jumlah total hasil produksi peternakan lokal dibagi jumlah total kebutuhan domestik terhadap produk peternakan) dikali 100 Keterangan :
	Persentase peningkatan hasil produksi peternakan	Alasan pemilihan indikator : Formulasi : (Jumlah keseluruhan produksi peternakan Tahun (n) dikurangi jumlah keseluruhan produksi peternakan (n-1))/Jumlah keseluruhan produksi peternakan (n) dikali 100 Keterangan :
	Persentase peningkatan populasi ternakan :	Alasan pemilihan indikator : Formulasi : (Jumlah keseluruhan populasi ternak Tahun (n) dikurangi jumlah keseluruhan populasi ternak tahun (n-1))/Jumlah keseluruhan populasi ternak (n) dikali 100 Keterangan :
	Persentase	Alasan pemilihan indikator :

					Terbinanya Kelompok peternak terampil	<p>Formulasi : Jumlah Kelompok peternak yang mendapatkan pembinaan dibagi jumlah kelompok peternak yang terdata dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>
					Persentase Pemenuhan kebutuhan Konsumsi Daging	<p>Alasan pemilihan indikator :</p> <p>Formulasi : Jumlah Produksi Daging pertahun dibagi Jumlah Kebutuhan Daging oleh masyarakat pertahun dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>
					Persentase Pemenuhan kebutuhan Konsumsi Telur	<p>Alasan pemilihan indikator :</p> <p>Formulasi : Jumlah Produksi telur pertahun dibagi Jumlah Kebutuhan telur oleh masyarakat pertahun dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>
					Persentase Pemenuhan kebutuhan Konsumsi Susu	<p>Alasan pemilihan indikator :</p> <p>Formulasi : Jumlah Produksi susu pertahun dibagi Jumlah Kebutuhan susu oleh masyarakat pertahun dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>
					Persentase Pemenuhan produksi Hasil Perikanan terhadap Kebutuhan masyarakat	<p>Alasan pemilihan indikator :</p> <p>Formulasi : Jumlah total hasil produksi perikanan lokal dibagi Jumlah total kebutuhan domestik terhadap produk perikanan dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>
					Persentase Peningkatan hasil produksi Perikanan	<p>Alasan pemilihan indikator :</p> <p>Formulasi : Jumlah keseluruhan produksi Perikanan tahun (n) dikurangi jumlah keseluruhan produksi Perikanan (n-1)dibagi 100</p> <p>Keterangan :</p>
					Persentase Pemenuhan kebutuhan Konsumsi ikan	<p>Alasan pemilihan indikator :</p> <p>Formulasi : Jumlah konsumsi Perikanan yang terpenuhi dibagi Jumlah produksi Perikanan dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>

URUSAN : **PERDAGANGAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	14
	6 Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata seluruh wilayah dengan menekankan pada pembangunan desa (Termaktub dalam nawa cita butir ketiga "Meneruskan pembangunan kabupaten semarang dari pinggiran dengan memperkuat desa ")			8 Terpenuhi sarana dan prasarana perdagangan	Persentase peningkatan omset perdagangan		<p>Alasan pemilihan indikator : indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembinaan dan fasilitasi pemerintah kabupaten semarang terhadap pemasaran produk perdagangan</p> <p>Formulasi : Omzet Perdagangan Tahun n -Omzet Perdagangan Tahun n(-1)dibagi Omzet Perdagangan Tahun n(-1) dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>
					Persentase peningkatan ekspor		<p>Alasan pemilihan indikator : indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembinaan dan fasilitasi pemerintah kabupaten semarang terhadap pemasaran produk perdagangan</p> <p>Formulasi : Nilai Ekspor tahun ini dikurangi Nilai Ekspor tahun lalu dibagi Nilai Ekspor tahun lalu dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>
					Persentase penurunan barang tidak layak edar		<p>Alasan pemilihan indikator : indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pengendalian dan pengawasan terhadap produk perdagangan</p> <p>Formulasi : selisih penemuan barang tidak layak edar tahun ini dengan penemuan barang tidak layak edar tahun lalu dibagi penemuan barang tidak layak edar tahun lalu dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>

URUSAN : **PERINDUSTRIAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	14
3	3 Meningkatkan Kegiatan Usaha Ekonomi Daerah dengan Memanfaatkan sumber Daya Lokal (sesuai dengan Nawa cita butir Kenam "Meningkatkan produktifitas masyarakat dan daya saing dengan daerah lain")			2 Terwujudnya kawasan industri yang dapat menyerap tenaga kerja lokal	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri kecil dan menengah		<p>Alasan pemilihan indikator : indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembinaan terhadap pengembangan industri kecil dan menengah oleh pemerintah kabupaten semarang</p> <p>Formulasi : Jumlah nilai produksi industri kecil menengah Tahun(n) - jumlah nilai produksi industri kecil dan menengah Tahun (n-1) dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>
			5 Diterapkannya teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka				

				pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal		Persentase pembinaan kelompok industri	Alasan pemilihan indikator : indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembinaan pola usaha industri kecil dan menengah oleh pemerintah kabupaten semarang Formulasi : Jumlah kelompok industri yang terbina dibagi jumlah kelompok industri yang terdata dikali 100 Keterangan :
						Persentase peningkatan jumlah industri	Alasan pemilihan indikator : indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pengembangan usaha dan produksi bagi industri kecil dan menengah Formulasi : (Jumlah industri tahun (n) dikurangi jumlah industri (n-1)) dibagi jumlah industri Tahun (n-1) dikali 100 Keterangan :

URUSAN : **TRANSMIGRASI**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	14
	2 Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Kreatif, Berbudaya, Berkarakter dan Menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi (sesuai dengan Nawacita butir Kelima dan Keenam Meningkatkan kualitas hidup Manusia serta meningkatkan produktifitas Masyarakat dan daya Saing dengan daerah Lain)			6 Tumbuhnya sikap dan perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja	Persentase calon transmigran yang trampil dan ahli		Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur tingkat keberhasilan pembinaan dan pelatihan SDM calon Transmigran Formulasi : Jumlah KK pemohon program transmigrasi yang terbina dibagi jumlah KK pemohon Program Transmigrasi yang terdata dikalikan 100 Keterangan :
						Jumlah KK Pemohon program transmigrasi pertahun	Alasan pemilihan indikator : Indikator ini untuk menunjukkan tingkat keberhasilan tindak lanjut program transmigrasi Formulasi : Jelas Keterangan :
						Jumlah KK calon transmigran yang mendapatkan pelatihan	Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur tingkat keberhasilan program pembinaan dan pelatihan SDM calon Transmigran Formulasi : Jelas Keterangan :
						Jumlah Transmigran yang ditempatkan	Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur tingkat keberhasilan program kerjasama Transmigrasi Formulasi : jelas Keterangan :

UNSUR : **STAF PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4 Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan akuntabel (sesuai dengan nawa cita butir ke dua membangun tata kelola			2 Meningkatnya disiplin ,kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah sehingga responsif			

UNSUR : **PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	14
4	4 Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan akuntabel (sesuai dengan nawa cita butir ke dua membangun tata kelola pemerintahan bersih,efektif dan terpercaya)			2 Meningkatnya disiplin ,kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan	Persentase Peningkatan fasilitasi legalisasi kebijakan daerah		<p>Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur kinerja fasilitasi legalisasi peraturan daerah kabupaten semarang</p> <p>Formulasi : Jumlah fasilitasi legalisasi kebijakan daerah Tahun (n) dikurangi Jumlah Fasilitasi legalisasi Kebijakan tahun (n-1) dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>
					Persentase Peningkatan Kebijakan Daerah yang disahkan		<p>Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur kinerja fasilitasi legalisasi peraturan daerah kabupaten semarang</p> <p>Formulasi : Jumlah Kebijakan daerah yang mendapatkan pengesahan dibagi Jumlah Pengajuan pengesahan kebijakan daerah dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>

UNSUR : **PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	14
4	4 Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan akuntabel (sesuai dengan nawa cita butir ke dua membangun tata kelola pemerintahan bersih,efektif dan terpercaya)			2 Meningkatnya disiplin ,kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan		Persentase Peningkatan Jumlah SKPD yang mempunyai Kinerja Baik	<p>Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur akuntabilitas kinerja dan Keuangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi</p> <p>Formulasi : Jumlah SKPD yang hasil evaluasi laporan Kinerja baik dan Realisasinya kinerja keuangan diatas 80 % dibagi Jumlah SKPD dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	14
						SKPD yang dinilai AKIP baik	<p>Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur akuntabilitas kinerja dan Keuangan satuan kerja perangkat daerah</p> <p>Formulasi : Jumlah SKPD yang nilai AKIP baik tahun (n) dibagi seluruh SKPD yang dievaluasi dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>
						Persentase Peningkatan Jumlah SKPD yang kinerja Keuangan nya baik	<p>Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur akuntabilitas dan pengelolaan Keuangan satuan kerja perangkat daerah</p> <p>Formulasi : Jumlah SKPD yang Realisasi Kinerjanya diatas 80 % tahun (n) dikurangi Jumlah SKPD yang Realisasi Kinerjanya diatas 80 % tahun n (-1) dibagi 100</p> <p>Keterangan :</p>
						Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP secara memadai	<p>Alasan pemilihan indikator : Indikator ini untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh satuan kerja perangkat daerah</p> <p>Formulasi : Jumlah SKPD yg menerapkan SPIP secara memadai tahun(n) dibagi jumlah seluruh SKPD yang dievaluasi dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>
						persentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti	<p>Alasan pemilihan indikator : Indikator ini untuk mengukur kinerja pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>Formulasi : Jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh temuan eksternal dan internal dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>
						Persentase jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	<p>Alasan pemilihan indikator : Indikator ini untuk mengukur kinerja pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>Formulasi : Jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh pengaduan dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	14

UNSUR : PERENCANAAN **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	14
4	Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan akuntabel (sesuai dengan nawa cita butir ke dua membangun tata kelola pemerintahan bersih,efektif dan terpercaya)			2 Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahandan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yan g responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal	Persentase Kesesuaian RKPd dengan RPJMD		Alasan pemilihan indikator : Indikator ini untuk mengukur tingkat keselarasan perencanaan pembangunan Kabupaten Semarang Formulasi : Jumlah Program RKPd yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD dikali 100 Keterangan :
					Persentase Kesesuaian RKA SKPD dengan RPJMD		Alasan pemilihan indikator : Indikator ini untuk mengukur tingkat keselarasan perencanaan pembangunan Kabupaten Semarang Formulasi : jumlah program yang sesuai RPJMD dibagi jumlah program RPJMD dikali 100 Keterangan :
					Prosentase Kesesuaian Renja SKPD dengan DPA		Alasan pemilihan indikator : Indikator ini untuk mengukur tingkat keselarasan perencanaan pembangunan Kabupaten Semarang Formulasi : Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD dikali 100 Keterangan :
					Persentase usulan kegiatan berbasis musrenbang yang tertuang dalam RKPd		Alasan pemilihan indikator : Indikator ini untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah Formulasi : Jumlah Kegiatan berbasis musrenbang yang tertuang dalam RKPd yang dibagi dengan jumlah keseluruhan kegiatan RKPd dikali 100 Keterangan :

UNSUR : KEPEGAWAIAN **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	14
4	Mewujudkan pelaksanaan			2 Meningkatnya disiplin	Persentase		Alasan pemilihan indikator :

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	14
	Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan akuntabel (sesuai dengan nawa cita butir ke dua membangun tata kelola pemerintahan bersih,efektif dan terpercaya)			,kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan	Kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan		Indikator ini untuk mengukur tingkat kesesuaian kompetensi dalam jabatan Formulasi : Jumlah pejabat yang ditempatkan sesuai kompetensi pendidikan formal dan fungsional teknis dibagi jumlah pejabat struktural dikalikan 100 Keterangan :
						Persentase aparatur yang mengalami peningkatan kompetensi	Alasan pemilihan indikator : Indikator ini untuk mengukur tingkat profesionalisme kinerja aparatur Formulasi : (Jumlah keseluruhan aparatur yang telah mengikuti diklat dan Pelatihan samapai tahun (n-1) ditambah Jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan Pelatihan tahun (n) dibagi Jumlah Keseluruhan aparatur dikali 100 Keterangan :
						Persentase pemenuhan kebutuhan diklat pengembangan kompetensi	Alasan pemilihan indikator : Indikator ini untuk mengukur peningkatan kompetensi aparatur Formulasi : Jumlah kebutuhan diklat aparatur yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan diklat aparatur dikali 100 Keterangan :
						Persentase jabatan struktural yang terisi	Alasan pemilihan indikator : Indikator ini untuk mengukur tingkat profesionalisme kinerja aparatur Formulasi : Jumlah Jabatan struktural dikurangi Jumlah jabatan struktural yang terisi dibagi jumlah jabatan struktural dikalikan 100 Keterangan :
						Persentase peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah yang lulus	Alasan pemilihan indikator : Indikator ini untuk mengukur peningkatan kompetensi aparatur Formulasi : Jumlah peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah dibagi jumlah peserta yang ikut ujian dikalikan 100 Keterangan :
					Persentase Peningkatan Pelayanan		Alasan pemilihan indikator : Indikator ini untuk mengukur tingkat profesionalisme kinerja aparatur

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	14
					Administrasi Kepegawaian Bagi Aparatur		Formulasi : Jumlah administrasi kepegawaian yang terselesaikan (n) dikurangi Jumlah administrasi kepegawaian yang terselesaikan (n-1) dibagi jumlah administrasi kepegawaian yang terselesaikan (n) dikalikan 100 Keterangan :
					Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu		Alasan pemilihan indikator : Indikator ini untuk mengukur tingkat profesionalisme kinerja aparatur Formulasi : Jumlah penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu dibagi jumlah permohonan administrasi kepegawaian terselesaikan dikali 100 Keterangan :
					Persentase Pegawai yang tidak disiplin		Alasan pemilihan indikator : Indikator ini untuk mengukur tingkat profesionalisme kinerja aparatur Formulasi : (Jumlah Pegawai dikurangi Jumlah pegawai tidak disiplin) dibagi Jumlah Pegawai dikalikan 100 Keterangan :

UNSUR : KEUANGAN **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	14
4	Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel (sesuai dengan nawa cita butir ke dua membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif dan terpercaya)	Opini BPK					Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Formulasi : Jelas (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Keterangan :
			Persentase Ketepatan waktu penyusunan pertanggungjawaban keuangan oleh SKPD				Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Formulasi : Jumlah SKPD yang menyampaikan pertanggungjawaban tepat waktu dibagi Jumlah keseluruhan SKPD dikali 100 Keterangan :
				Meningkatnya	Persentase		Alasan pemilihan indikator :

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	14
				kemampuan manajemen pemerintah dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal	peningkatan pendapatan daerah		indikator ini untuk mengukur keberhasilan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah Formulasi : jumlah total pendapatan daerah tahun (n) dikurangi jumlah total pendapatan daerah (n - 1) dibagi jumlah total pendapatan daerah tahun (n-1) dikali 100 Keterangan :
						Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur keberhasilan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah Formulasi : Jumlah Pendapatan Retribusi Tahun (n) dikurangi Jumlah Pendapatan Retribusi Tahun (n - 1) dibagi Jumlah Pendapatan Retribusi Tahun (n-1) dikali 100 Keterangan :
						Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur keberhasilan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah Formulasi : Jumlah Pendapatan PBB Tahun (n) dikurangi Jumlah Pendapatan PBB Tahun (n - 1) dibagi Jumlah Pendapatan PBB Tahun (n-1) dikali 100 Keterangan :
						Persentase wajib pajak yang membayar PBB tepat waktu	Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur keberhasilan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah Formulasi : Jumlah Wajib Pajak yang membayar tepat waktu dibagi Jumlah wajib pajak yang terdata dikali 100 Keterangan :
						Prosentase Peningkatan pendapatan dari pajak daerah	Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur keberhasilan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah Formulasi : Jumlah Pendapatan pajak Tahun n - Jumlah Pendapatan pajak Tahun (n - 1) dibagi Jumlah Pendapatan pajak Tahun (n-1) dikali 100 Keterangan :

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	14
					Persentase aset yang terkelola dengan baik		<p>Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur keberhasilan pengelolaan aset</p> <p>Formulasi : jumlah aset yang tertib administrasi dan dimanfaatkan (n) dikurangi jumlah aset yang tertib administrasi dan dimanfaatkan (n-1) dibagi 100</p> <p>Keterangan :</p>
						Persentase penilaian aset daerah	<p>Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur keberhasilan pengelolaan aset</p> <p>Formulasi : Jumlah Aset ternilai dibagi Jumlah Aset teridentifikasi dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>
						Persentase aset yang dihapus	<p>Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur keberhasilan pengelolaan aset</p> <p>Formulasi : Jumlah Surat Keputusan Penghapusan dibagi Jumlah total aset dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>
						Persentase pemanfaatan aset daerah	<p>Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur keberhasilan pengelolaan aset</p> <p>Formulasi : Jumlah Aset termanfaatkan dibagi Jumlah Total Aset Daerah dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>

FUNGSI : **PENANGGULANGAN BENCANA**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	14
4	4 Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan Sesuai dengan nawa cita kelima "meningkatkan kualitas hidup manusia "			3 terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan	Persentase ketersediaan desa tangguh bencana		<p>Alasan pemilihan indikator : Indikator ini untuk mengukur tingkat kemampuan masyarakat/desa dalam penanggulangan dan penanganan bencana</p> <p>Formulasi : Jumlah desa yang telah memiliki ketersediaan tenaga siap bencana dan telah mendapatkan pelatihan pengurangan bencana dibagi jumlah desa rawan Bencana dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>
					Persentase kesiapan masyarakat terhadap Penanganan dan Penanggulangan Bencana		<p>Alasan pemilihan indikator : Indikator ini untuk mengukur kesiapsiagaan warga desa/ kelurahan /kampung dalam menghadapi bencana</p> <p>Formulasi : Jumlah KK pada daerah rawan bencana yang terbina dibagi Jumlah KK lokasi rawan bencana dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>
					Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan dan Penanganan Bencana Daerah		<p>Alasan pemilihan indikator : Indikator ini untuk mengukur tingkat kemampuan masyarakat/desa dalam penanggulangan dan penanganan bencana</p> <p>Formulasi : jumlah wil rawan bencana yg memiliki tenaga siap bencana dibagi jumlah wil rawan bencana dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>
					Jumlah Area Rawan Bencana yang terpetakan		<p>Alasan pemilihan indikator : Indikator ini untuk memetakan daerah yang memiliki potensi dan kerawanan bencana</p> <p>Formulasi : Jumlah Area yang berpotensi dibagi sering terjadi pernah terjadi bencana alam dibagi jumlah keseluruhan desa/kelurahan dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>
					Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi daerah Bencana		<p>Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur ketepatan, kecepatan dalam penanganan bencana</p> <p>Formulasi : Jumlah obyek bencana yang tertangani dibagi Jumlah Keseluruhan Obyek Bencana dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>

FUNGSI : **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	14
4	4 Menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi			3 Meningkatkan keamanan dan budaya tertib masyarakat ,penegakan keadilan serta supremasi hukum	Persentase Penurunan Kejadian konflik sosial masyarakat		<p>Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur tingkat keberhasilan penanganan situasi keamanan, ketentraman, dan ketertiban dan membandingkannya dengan tahun sebelumnya</p> <p>Formulasi : Jumlah kejadian konflik tahun (n) dikurangi jumlah kejadian konflik tahun (n-1) dibagi umlah kejadian konflik tahun n dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>
						Persentase Pembinaan Politik pada masyarakat	<p>Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur Untuk mengetahui peran masyarakat dalam Partai Politik</p> <p>Formulasi : (Jumlah lembaga masyarakat yang sudah mendapatkan pembinaan politik + n-1) dibagi jumlah keseluruhan lembaga masyarakat dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>
						Persentase Pembinaan toleransi kerukunan beragama pada masyarakat	<p>Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur tingkat kondusifitas kehidupan beragama</p> <p>Formulasi : (Jumlah lembaga masyarakat yang sudah mendapatkan pembinaan keagamaan+ (n-1))dibagi jumlah keseluruhan lembaga masyarakat dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>
						Persentase Pembinaan wawasan kebangsaan pada masyarakat	<p>Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur tingkat pemahaman Wawasan Kebangsaan Masyarakat</p> <p>Formulasi : (Jumlah lembaga masyarakat yang sudah mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan+ (n-1)) dibagi jumlah keseluruhan lembaga masyarakat dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>

FUNGSI : **PENUNJANG LAINNYA (KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA)**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	14
4	4 Mewujudkan pelaksanaan			3 Mantapnya	Persentase		Alasan pemilihan indikator :

<p>Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan akuntabel (sesuai dengan nawa cita butir ke dua membangun tata kelola pemerintahan bersih,efektif dan terpercaya)</p>		<p>administrasi pemerintahan dalam penerapan informasi comunication and technologi melalui electronic government dalam rangka peningkatan kualitas,pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data</p>	<p>peningkatan indeks mutu pelayanan terhadap masyarakat</p>		<p>Indikator ini untuk mengukur peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat</p> <p>Formulasi : Rata Rata indeks kepuasan masyarakat tahun (n) dikurangi rata rata indeks kepuasan masyarakat tahun (n-1) dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>
				Persentase Peningkatan Jumlah pelayanan pada kecamatan	<p>Alasan pemilihan indikator : Indikator ini untuk mengukur peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat</p> <p>Formulasi : (jumlah pemohon layanan tahun (n) dikurangi jumlah pemohon layanan tahun (n-1) dibagi jumlah pemohon layanan tahun (n-1) dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>
				Persentase Partisipasi masyarakat terhadap usulan pembangunan dalam musrenbang tingkat Kecamatan	<p>Alasan pemilihan indikator : Indikator ini untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan</p> <p>Formulasi : Jumlah usulan pembangunan dibagi Jumlah partisipasi kehadiran dalam musrenbang kecamatan dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>
				Persentase Jumlah usulan prioritas pembangunan yang terakomodir	<p>Alasan pemilihan indikator : Indikator ini untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan</p> <p>Formulasi : Jumlah usulan pembangunan yang menjadi prioritas dibagi jumlah usulan pembangunan yang disampaikan dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>
				Persentase pembinaan kemasyarakatan	<p>Alasan pemilihan indikator : indikator ini untuk mengukur tingkat keberhasilan pembinaan terhadap masyarakat</p> <p>Formulasi : Jumlah pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dibagi jumlah jenis lembaga kemasyarakatan dikali 100</p> <p>Keterangan :</p>

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 73 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 TAHUN 2016 - 2021

URUSAN PEMERINTAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 URUSAN : PENDIDIKAN

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan		
							2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2 Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Kreatif, Berbudaya, Berkarakter dan Menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi (sesuai dengan Nawacita butir Kelima dan Keenam Meningkatkan kualitas hidup Manusia serta meningkatkan produktifitas Masyarakat dan daya Saing dengan daerah Lain)	Angka Partisipasi Sekolah													
		Usia 7 - 12 Tahun				100	100	100	100	100	100	100	100		
		Usia 13 - 15 Tahun				96.89	96.90	96.91	96.92	96.93	96.93	96.93	96.94		
		Usia 16 -18 Tahun				61.35	61.36	61.37	61.38	61.39	61.40	61.40	61.41		
		Prosentase Tingkat kelulusan													
		SD/MI				100	100	100	100	100	100	100	100		
		SMP/MTs				100	100	100	100	100	100	100	100		
		SMA/SMK				99.96	99.97	99.98	99.99	100	100	100	100		
					1 Meningkatkan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing pada semua jenjang pendidikan			Angka Partisipasi Kasar (%)							
								Usia 4 - 6 Tahun untuk usia PAUD							
								Usia 7 -12 Tahun untuk usia sekolah SD	60.50	64.80	67.40	69.40	72.05	72.77	
								Usia 13 - 15 Tahun untuk usia sekolah SLTP	100	100	100	100	100	100	
								Usia 16-18 Tahun ungtuk usia sekolah SLTA	96.04	96.28	96.29	96.3	93.31	94.24	
									60.00	69.10	69.20	69.30	69.40	70.09	
								Angka Partisipasi Murni (%)							
						Usia 7 -12 Tahun untuk usia sekolah SD	95.17	95.19	95.21	95.23	95.25	95.35			
						Usia 13 - 15 Tahun untuk usia sekolah SLTP	81.82	81.85	81.86	81.88	81.90	81.98			
						Usia 16-18 Tahun ungtuk usia sekolah SLTA	45.00	47.25	47.50	47.75	48.00	48.05			

				2 meningkatnya jumlah kualitas sarana prasarana pendidikan baik formal maupun non formal	Prosentase Ruang kelas SD yang sesuai standar Nasional Pendidikan (%)											
					n1 untuk sekolah SD	91.75	92.00	92.01	92.03	92.04	92.13					
					n2 untuk sekolah SLTP	97.5	97.51	97.52	97.53	97.54	97.64					
					n3 untuk sekolah SLTA	98.12	98.13	98.14	98.15	98.16	98.26					
				3 Tersediannya Tenaga pendidik dan Tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi yang memiliki intelegence quotient,emotional quotient dan spritual quotient	Persentase Guru berpendidikan S1/DIV (%)											
					n untuk sekolah TK/RA	63.18	63.97	64.75	65.52	66.27	66.34					
					n1 untuk sekolah SD	84.99	94.9	84.91	84.92	84.93	85.01					
					n2 untuk sekolah SLTP	94	94.1	94.2	94.3	94.4	94.49					
					n3 untuk sekolah SLTA	98	98	98.01	98.01	98.02	98.12					
					Persentase Guru Bersertifikat Pendidik (%)											
					n1 untuk sekolah SD	37.93	40.53	43.09	45.62	48.10	48.58					
				n2 untuk sekolah SLTP	61.50	56.10	56.11	56.12	56.13	56.69						
				n3 untuk sekolah SLTA	61.00	61.10	61.20	61.30	61.40	62.01						
4 Tersedianya sekolah sekolah kejuruan yang sinergi den kebutuhan dunia usaha dan dunia industri	Prosentase Tingkat penyerapan Lulusan SMK di bidang Industri (%)	39.00	36.02	36.03	36.04	36.05	36.41									

URUSAN : **KESEHATAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1 Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat (sesuai dengan Nawa Cita butir Kelima "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia di	Angka Harapan Hidup											
				1 Terpenuhinya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat pertahun (%)								

Kabupaten
Semarang)

2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas		Persentase pelayanan kesehatan pada rumah sakit	8.88	8.94	9.88	8.79	8.13	8.01	
			Persentase Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat	4.76	5.23	5.27	6.28	6.87	7.12	
			Indeks penggunaan tempat Tidur (BOR)	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	
			Indeks lama hari perawatan (Av Loss)	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	
			Indeks Kematian Umum Pasien (GDR)	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	
			Indeks Tingkat Penggunaan Tempat Tidur dalam satu tahun (BTO)	60.00	60.00	58.00	58.00	55.00	54.00	
3	Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat (upaya promotif dan preventif kesehatan di masyarakat)									
4	Meningkatnya sanitasi lingkungan dan terpenuhinya kebutuhan air bersih	Persentase Sanitasi lingkungan dalam kondisi baik (%)								
5	Terpenuhinya kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui anak balita serta anak sekolah dasar	Prevalensi Gizi kurang pada balita (%)								
7	Terpenuhinya sarana dan prasarana Kesehatan	Prosentase Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan								

URUSAN : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target					Keterangan	
							2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6 Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata seluruh wilayah dengan menekankan pada pembangunan desa (Termaktub dalam nawa cita butir ketiga "Meneruskan pembangunan kabupaten semarang dari pinggiran dengan memperkuat desa ")	Prosentase Kondisi infrastruktur dalam kondisi baik											
					Persentase Sarana prasarana Jalan Kabupaten yang representatif		73	75	77	80	82	85	
					Persentase Panjang jalan yang kondisi baik		0.0293	0.0113	0.0138	0.0199	0.0221	0.0265	
					Persentase drainase jalan dalam kondisi baik								
					Persentase Jumlah panjang trotoar jalan dalam kondisi baik								
					Jumlah panjang pembangunan jalan baru								
					Persentase Jaringan Penerangan jalan dalam kondisi baik		1.07	1.06	1.06	1.05	1.04	1.08	
					Persentase Sarana prasarana jembatan yang representatif		94.96	95.85	96.74	97.63	98.52	99.41	
					Persentase jembatan yang terhabilitasi		5.31	4.33	3.37	2.43	1.51	0.6	
					Jumlah titik pembangunan jembatan baru								
					Persentase sarana prasarana Gedung dan bangunan milik Pemerintah yang representatif								

	Persentase Bangunan dan gedung pemerintah dalam kondisi baik	60	60	60	60	60	60
	Persentase pembangunan keciptakarya	10	10	10	10	10	10
	Persentase kepatuhan Rumah dan Bangunan yang sesuai RDTR						
	Jumlah Bangunan yang memiliki IMB	50	50	50	50	50	50
	Persentase pelanggaran Tata Ruang	50	50	50	50	50	50
	Persentase Penyediaan Ruang Terbuka Hijau	25.62	25.63	25.64	25.7	25.75	25.8
	Persentase permukiman yang layak huni	85.44	89.08	92.72	96.36	100	100
	Persentase peningkatan jalan lingkungan yang tertata						
	Persentase Sanitasi lingkungan dalam kondisi baik	11.76	16.44	25.86	52.63	90	100
	Persentase Rehabilitasi Permukiman kumuh	25.54	43.88	69.59	100		
	Persentase Pemenuhan ketersediaan sarana air bersih	18.33	16.33	13.41	35.21	36.96	62.07
	Persentase rata rata Sampah yang terolah dengan baik perhari	20.35	20.49	20.69	20.74	20.99	21.24
	Persentase Saluran Pengairan dalam kondisi baik	44.20	53.00	57.00	62.00	67.00	72.00

				Persentase Rehabilitasi gorong gorong/ Drainase								
				Persentase Jaringan Saluran sungai dalam kondisi baik	15.38	18.18	22.22	28.57	40	66.67		
			2 Tersedianya jaringan irigasi dan sumber sumber air untuk pertanian	Persentase Saluran Pengairan dalam kondisi baik (%)								
			3 Tersedianya prasarana olahraga ,ruang publik dan ruang terbuka hijau di perkotaan	Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (ha)								
			4 Tersedianya sarana dan prasarana air bersih yang memadai	Pemenuhan ketersediaan sarana air bersih (%)								
			5 Tersedianya rumah layak huni dan rumah bersantitas	Persentase permukiman yang layak huni (%)								
			6 Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah	rata rata Sampah yang terolah dengan baik perhari (m ³)								
			7 Terpenuhinya kebutuhan energi listrik	Rasio elektrifikasi (%)								
			8 Terpenuhinya sarana dan prasarana perdagangan	Persentase peningkatan omset perdagangan								
					Persentase peningkatan ekspor							
					Persentase penurunan barang tidak layak edar							

URUSAN : **PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	6 Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata seluruh wilayah dengan menckankan pada pembangunan desa (Termaktub dalam nawa cita butir ketiga "Meneruskan pembangunan kabupaten semarang dari pinggiriran dengan memperkuat desa ")				Persentase permukiman yang layak huni		85.44	89.08	92.72	96.36	100	100		
						Persentase peningkatan jalan lingkungan yang tertata								
						Persentase Sanitasi lingkungan dalam kondisi baik		11.76	16.44	25.86	52.63	90	100	
						Persentase Rehabilitasi Permukiman kumuh		25.54	43.88	69.59	100			
						Persentase Pemenuhan ketersediaan sarana air bersih		18.33	16.33	13.41	35.21	36.96	62.07	
						Persentase rata rata Sampah yang terolah dengan baik perhari		20.35	20.49	20.69	20.74	20.99	21.24	
						Persentase Saluran Pengairan dalam kondisi baik		44.20	53.00	57.00	62.00	67.00	72.00	
				7 Terpenuhinya kebutuhan energi listrik	Rasio elektrifikasi (%)									

URUSAN : **KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan			
							2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
5	5 Menciptakan Iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi (Sesuai dengan Nawacita Kedelapan "Menggerakkan revolusi mental dalam setian gerak			3 Meningkatkan keamanan dan budaya tertib masyarakat ,penegakan keadilan serta supremasi hukum	penurunan jumlah pelanggaran perda (%)		54.00	49.00	44.00	39.00	35.00	14.00				
							Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk		1.06	0.95	1.25	1.56	1.86	1.88		
								Cakupan Penegakan Perda		97.00	97.00	98.00	98.00	98.00	98.00	
								Cakupan Patroli petugas Pol PP		2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
								Persentase		3,00	1.03	1.04	1.05	1.06	1.00	

pembangunan")	penurunan pelanggaran terhadap ketertiban umum	Cakupan Rasio Linmas	1.34	1.36	1.36	1.38	1.41	1.42	
		Cakupan Profesionalisme Petugas Linmas Kabupaten	13.86	27.36	41.29	54.86	68.43	81.20	
		Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	72.40	73.90	74.90	75.90	76.90	77.90	
		Rasio Pos Kamling per jumlah desa/ kelurahan	14.58	14.60	14.62	14.64	14.66	14.81	
		Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3	72.37	73.33	74.53	75.85	77.10	78.31	
		Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1.50	3.00	3.75	3.00	3.00	3.03	

URUSAN : **SOSIAL**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Mewujudkan peran serta dan Kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak hak anak (sesuai dengan nawacita butir ke sembilan "memperteguh kebinekaan dan			2 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan penyandang masalah sosial dalam proses pembangunan di segala bidang guna peningkatan kualitas hidup	Persentase penurunan tingkat penyandang masalah sosial (%)		0.99	1.1	0.88	0.99	0.99	1.1	
					Persentase penyandang masalah sosial yang tertangani		80.21	80.3	80.21	80.21	80.21	81.01	
					Persentase Penyandang masalah sosial yang menerima bantuan		3.95	7.85	11.72	15.55	19.35	19.54	

URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN :TENAGA KERJA

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2 Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Kreatif, Berbudaya, Berkarakter dan Menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi (sesuai dengan Nawacita butir Kelima dan Kecnam Meningkatkan kualitas hidup Manusia serta meningkatkan produktifitas Masyarakat dan daya Saing dengan daerah Lain)			5 Tersedianya tenaga kerja terampil dan berkualitas sesuai kebutuhan serta memiliki daya saing	calon tenaga kerja yang Terampil (%)		89.49	90.38	91.29	92.20	93.12	94.05	
6 Tumbuhnya sikap dan perilaku kewirausahaan masyarakat sehingga mampu menciptakan lapangan kerja				Tingkat pengangguran terbuka (%)		56.71	55.49	54.3	47.44	42.70	38.43		
				Persentase Penduduk Usia Kerja yang bekerja		53	53.2	53.3	53.4	53.50	53.50		
				Jumlah calon tenaga kerja yang Terampil		2.86	5.71	8.57	11.43	14.29	14.29		
				Persentase serapan tenaga kerja		53,41	48,69	44,39	40,49	36,95	36,96		

URUSAN : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Mewujudkan peran serta dan Kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak hak anak (sesuai dengan nawacita butir ke sembilan "memperteguh kebinekaan dan Memperkuat rstorasi sosial"	Indeks Pemberdayaan Gender					44.31	44.8	45.73	47.15	47.18	49.07		
Persentase partisipasi angkatan perempuan di lembaga pemerintahan							19.20	19.00	18.61	18.06	18.05	17.35		
persentase cakupan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak								54.55	71.43	93.02	118.42	151.52	151.52	
Rasio Kekerasan Dalam rumah tangga								0.019	0.017	0.015	0.013	0.011	0.011	

				3 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap hak hak anak melalui sinergitas pemerintah ,masyarakat dan swasta	Prosentase pemenuhan fasilitas umum untuk anak								
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

URUSAN : **PANGAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target					Keterangan	
							2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3 Meningkatkan Kegiatan Usaha Ekonomi Daerah dengan Memanfaatkan sumber Daya Lokal (sesuai dengan Nawa cita butir Keenam "Meningkatkan produktifitas masyarakat dan daya saing dengan daerah lain")			4 Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis ,agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik sektor pertanian	Prosentase Ketersediaan pangan	Prosentase Cadangan Pangan							
						Angka Kecukupan Gizi							
						Peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
						Prosentase Keamanan Pangan							
						Persentase peningatan informasi pasokan, harga dan akses							
						Persentase stabilitas harga dan pasokan pangan							
						Persentase berkurangnya daerah rawan pangan							

URUSAN : **PERTANAHAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target					Keterangan	
							2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4 Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel (sesuai dengan nawa cita butir ke dua membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif dan terpercaya)			3 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan satuan kerja perangkat daerah	Prosentase kebijakan penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah diimplementasikan dengan baik		100	100	100	100	100	100	

URUSAN : **LINGKUNGAN HIDUP**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target					Keterangan		
							2016	2017	2018	2019	2020		2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	Memfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan Sesuai dengan nawa cita kelima "meningkatkan kualitas hidup manusia "	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup					33.27	34.48	35.60	36.75	37.89	38.27		
							Tutupan Hutan	26.05	49.98	50.00	65.00	65.00	65.00	
							Kualitas Air Sungai	30.00	35.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
							Kualitas Udara	77.78	66.00	77.78	85.00	86.00	86.00	
				2 Terwujudnya jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pertahun		0.75	1.21	1.12	1.15	1.14	0.38		

URUSAN : **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4 Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan akuntabel (sesuai dengan nawa cita butir ke dua membangun tata kelola pemerintahan bersih,efektif dan terpercaya)			1 Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan informasi communication and teknologi melalui electronic goverment dalam rangka peningkatan kualitas,pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data	Persentase Infrastruktur Jaringan yang terkoneksi dengan baik (%)		100	100	100	100	100	100	
					Persentase tertib Administrasi kependudukan		87.24	88.62	90.03	91.46	92.91	94.38	
					Prosentase Kepemilikan		100	100	100	100	100	100	
					ProsentaseKepemilikan		95	97	98	99	100	100	
					Persentase perpindahan penduduk masuk (imigrasi)		0.5	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	
					Persentase perpindahan penduduk keluar (emigrasi)		0.5	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	
					Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran		77.5	80	82.5	85	87.5	90	
					Prosentase Kepemilikan Akta Kematian		42	44	46	48	50	50	
					Prosentase Pertumbuhan Penduduk (Pelaporan)		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	

URUSAN : **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6 Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang	Indeks pembangunan Desa					29,5	36.8	38.6	40.6	42.6	44.7	

berkualitas dan merata seluruh wilayah dengan menekankan pada pembangunan desa (Termaktub dalam nawa cita butir ketiga "Meneruskan pembangunan kabupaten semarang dari pinggiran dengan memperkuat desa ")	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur desa					38.00	54.20	68.80	81.90	93.70	84.10	
	Persentase jalan desa dalam kondisi baik					61.20	64.30	67.50	70.90	74.40	78.20	
	Persentase Peningkatan SDM Aparatur desa					38.20	54.40	69.10	82.30	94.10	58.20	
	Persentase Peningkatan nilai kekayaan asct desa					10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	14.00	

URUSAN : **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Mewujudkan peran serta dan Kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak hak anak (sesuai dengan nawacita butir ke sembilan "memperteguh kebinnekaan dan Memperkuat rstorasi sosial"	Indeks Pemberdayaan Gender					44.31	44.8	45.73	47.15	47.18	49.07	
			Persentase partisipasi angkatan perempuan di lembaga pemerintahan				19.20	19.00	18.61	18.06	18.05	17.35	
			persentase cakupan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak				54.55	71.43	93.02	118.42	151.52	151.52	
			Rasio Kekerasan Dalam rumah tangga				0.019	0.017	0.015	0.013	0.011	0.011	
				3 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap hak hak anak mclalui sinergitas pemerintah ,masyarakat dan swasta	Prosentase pemenuhan fasilitas umum untuk anak								

URUSAN : **ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4 Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan akuntabel (sesuai dengan nawa cita butir ke dua membangun tata kclola pemerintahan bersih,efektif dan terpercaya)			1 Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan informasi communication and teknologi melalui electronic government dalam rangka peningkatan kualitas,pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data	Persentase Infrastruktur Jaringan yang terkoneksi dengan baik (%)		100	100	100	100	100	100	
					Persentase tertib Administrasi kependudukan		87.24	88.62	90.03	91.46	92.91	94.38	
					Prosentase Kepemili		100	100	100	100	100	100	
					ProsentaseKepemilik		95	97	98	99	100	100	
					Persentase perpindahan penduduk masuk (imigrasi)		0.5	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	
					Persentase perpindahan penduduk keluar (emigrasi)		0.5	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	
					Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran		77.5	80	82.5	85	87.5	90	
					Prosentase Kepemilikan Akta Kematian		42	44	46	48	50	50	
					Prosentase Pertumbuhan Penduduk (Pelaporan)		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	

URUSAN : **PERHUBUNGAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target					Keterangan	
							2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6 Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata seluruh wilayah dengan menckankan pada pembangunan desa (Termaktub dalam nawa cita butir ketiga "Meneruskan pembangunan kabupaten semarang dari pinggiran dengan memperkuat desa")			1 Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas dan merata	Tingkat Keselamatan lalu Lintas(Standar Fatalitas Nasional/ Case Fatality rate:3,14)		10,81	3,39	8,08	6,85	5,71	4,66	
		Persentase peningkatan kendaraan yang layak jalan	1,13		0,05	24,42	12,91	13,67	13,67				
		Persentase rambu rambu lalu lintas dalam kondisi baik	0,84		0,85	0,87	0,86	0,87	0,87				
		Volume/Jumlah Kendaraan yang melintas(LHR)	113.80		118.18	122.55	126.93	131.31	135.68				
		Persentase pemenuhan kebutuhan rambu lalu lintas	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
		Rasio Ketersediaan fasilitas tempat parkir	4.76		4.32	3.94	3.58	3.25	3.25				
		Persentase keterjangkauan alat transportasi umum	0.59		0.59	0.59	0.59	0.59	0.59				
		Persentase Fasilitas terminal yang sesuai standar	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
		Rata Rata Jumlah angkutan yang masuk terminal perhari	1,413		1,413	1,413	1,413	1,413	1,413				
		Jumlah keseluruhan trayek angkutan	63		63	63	63	63	63				
		Persentase angkutan orang yang memiliki ijin jalan	0.20		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20				
		Persentase angkutan barang yang memiliki ijin jalan	0.20		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20				

URUSAN : **KOMUNIKASI DAN INFORMASI**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4 Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan akuntabel (sesuai dengan nawa cita butir ke dua membangun tata kelola pemerintahan bersih,efektif dan terpercaya)			1 Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan informasi communication and technology melalui electronic goverment dalam rangka peningkatan kualitas,pemerataan pelayanan publik dan pembangunan sistem data	Persentase Infrastruktur Jaringan yang terkoneksi dengan baik (%)		100	100	100	100	100	100	
				4 Terciptanya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan	Presentase masyarakat yang mengakses media informasi pembangunan daerah (%)		24.59	25.82	27.11	28.47	29.89	31.151	
				5 Meningkatkan kemampuan manajemen pemerintah dan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal	Persentase Sistem Informasi Yang Dapat Diaplikasikan Secara Optimal (%)		8.16	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56	

URUSAN : **KOPERASI, USAHA MIKRO**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3 Meningkatkan Kegiatan Usaha Ekonomi Daerah dengan Memanfaatkan sumber Daya Lokal (sesuai dengan Nawa cita butir Keenam "Meningkatkan produktifitas masyarakat dan daya saing dengan daerah lain")	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi					5,62	5,81	5,98	6,15	6,33	6,50	
				1 Terwujudnya sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas daerah yang memiliki daya saing	Persentase Peningkatan Nilai Produksi UMKM								
					Persentase UMKM yang terbina								
					Persentase Peningkatan Jumlah UMKM								
					Persentase Peningkatan omzet UMKM								
				7 Tumbuhkembangnya kelompok usaha produktif ,badan usaha milik petani dan lembaga keuangan mikro antara lain kemitraan bisnis dan pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	Persentase peningkatan Koperasi yang berkualitas (%)								
					Persentase koperasi yang pengurus mendapatkan peningkatan kompetensi								
					Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi								
					Persentase peningkatan Koperasi berbadan hukum								

URUSAN : **PENANAMAN MODAL**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5 Menciptakan Iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi (Sesuai dengan Nawacita Kedelapan	Prosentase Peningkatan Nilai investasi Daerah					1.96	2.91	3.85	4.76	5.66	6.23	
						Persentase Peningkatan nilai penanaman modal daerah	22.61	8.79	8.79	8.79	16.81	16.81	

	"Menggerakkan revolusi mental dalam setiap gerak pembangunan")		1 Tersedianya dokumen tata ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang	Persentase kepatuhan Rumah dan Bangunan yang sesuai RDTR (%)									
			2 Meningkatnya pelayanan perijinan yang tertib ,tepat waktu,transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat pada SKPD Perijinan		82.73	83.56	84.4	85.24	86.09	86.95		
				Persentase Peningkatan Pelayanan Perijinan	Persentase peningkatan jumlah pengajuan ijin unit usaha masyarakat	1.96	2.91	3.85	4.76	5.66	6.23		
					Persentase terjadinya pengaduan dibagi gugatan masyarakat terhadap ijin yang telah terbit	1.96	2.91	3.85	4.76	5.66	6.23		
						0.21	0.19	0.16	0.14	0.12	0.1		
8	Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan Sesuai dengan nawa cita kelima "meningkatkan kualitas hidup manusia "		6 Terkendalinya pemanfaatan lahan untuk pembangunan ekonomi dan investasi daerah yang sesuai dengan RTRW dan RDTR	Persentase tingkat kesesuaian Lahan Investasi terhadap Dokumen RTRW (%)									

URUSAN : **PEMUDA DAN OLAH RAGA**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Kreatif, Berbudaya, Berkarakter dan Menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi (sesuai dengan Nawacita butir Kelima dan Keenam Meningkatkan kualitas hidup Manusia serta meningkatkan produktifitas Masyarakat			7 Meningkatnya sinergitas antara pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan dalam pendidikan budi pekerti, budaya, agama, pemuda olah raga dan revolusi	Jumlah Lembaga pendidikan keagamaan yang mendapatkan bantuan (%)		0	20	40	60	80	100	
					Persentase peningkatan peran serta pemuda perorangan dan organisasi kepemudaan		20	20	40	40	40	40	
					Persentase pemuda dan organisasi kepemudaan yang berprestasi		33.33	40	46.67	53.33	60	66.67	

dan daya Saing dengan daerah Lain)	mental;	Persentase pemuda yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18
		Indeks cabang olahraga yang berprestasi	40	50	60	70	80	90
		Persentase pemenuhan sarana olahraga bagi cabang olahraga	40	50	60	70	80	90
		Persentase ketersediaan pelatih olahraga yang berkualitas	50	55	60	65	70	75
		Persentase Atlet yang berprestasi	50	55	60	65	70	75

URUSAN : **STATISTIK**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1 Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat (sesuai dengan Nawa Cita butir Kelima "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia di	Angka Harapan Hidup					72,42	72,9	72,56	72,64	72,71	72,78	
			Angka Kematian Bayi (AKB)				10,08	10,06	10,04	10,02	10	9,80	
			Angka Kematian Balita (AKABA)				12,40	12,20	12,10	12	11,80	11,60	
			Angka Kematian Ibu (AKI)				117	117	116	116	115	115	
3	3 Meningkatkan Kegiatan Usaha Ekonomi Daerah dengan Memanfaatkan sumber Daya Lokal (sesuai dengan Nawa cita butir Keenam	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi					5,62	5,81	5,98	6,15	6,33	6,50	
			Nilai PDRB (Trilyun Rp.)				18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	
			Laju Inflasi %				3,12	3,40	3,67	3,95	4,22	4,5	
			Pendapatan per kapita (Juta Rp.)				6.383	6.539	6.695	6.851	7.007	7.161	
			Persentase penduduk miskin (%)				7,70	7,50	7,30	7,10	6,80	6,50	

URUSAN : **PERSANDIAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4 Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efisien dan akuntabel (sesuai dengan nawa cita butir ke dua membangun tata kelola pemerintahan bersih,efektif dan terpercaya)			2 Meningkatnya disiplin ,kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan		prosentase jenis informasi sandi yang wajib diamankan	100	100	100	100	100	100	

URUSAN : **KEBUDAYAAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3 Meningkatkan Kegiatan Usaha Ekonomi Daerah dengan Memanfaatkan sumber Daya Lokal (sesuai dengan Nawa cita butir Keenam "Meningkatkan produktiofitas masyarakat dan			6 6. Berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat, budaya lokal, potensi sumber daya alam, serta industri kreatif		Persentase peningkatan Partisipasi masyarakat terhadap pelestarian budaya	Persentase lembaga kesenian yang terbina						
						Persentase Lembaga Kesenian yang aktif							
						Persentase benda cagar budaya yang terawat							

URUSAN : **PERPUSTAKAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2 Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Kreatif,Berbudaya, Berkarakter dan Menguasai Ilmu pengetahuan dan					Persentase pemustaka pertahun	13.27	13.32	13.39	13.44	13.46	13.60	
						persentase perpustakaan yang terbina	5.83	7.63	9.87	11.67	14.18	14.32	

	teknologi (sesuai dengan Nawacita butir Kelima dan Keenam Meningkatkan					Persentase Peningkatan Pemenuhan sarana keperpustakaan	6.25	12.55	19.25	26.05	32.99	40.00	
--	--	--	--	--	--	--	------	-------	-------	-------	-------	-------	--

URUSAN : **KEARSIPAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4 Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan akuntabel (sesuai dengan nawa cita			1 Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan informasi communication and technology melalui electronic goverment dalam	Penerapan pengelolaan arsip secara baku		52.05	86.96	91.3	95.65	100	100	
					Prosentase pelaksanaan Otomasi Arsip	16.83	22.77	20.79	22.28	17.33	17.5		
					Prosentase SKPD yang menerapkan arsip secara baku	82,61	86.96	91.3	95.65	100	100		

URUSAN PEMERINTAH PILIHAN

URUSAN : **PARIWISATA**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan				
							2016	2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
3	3 Meningkatkan Kegiatan Usaha Ekonomi Daerah dengan Memanfaatkan sumber Daya Lokal (sesuai dengan Nawa cita butir Keenam "Meningkatkan produktiofitas masyarakat dan daya saing dengan daerah lain")	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi		6 Berkembangnya industri pariwisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal	Persentase peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata (%)					6,15	6,33	6,50					
					Jumlah Target Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor pariwisata(Rp.000)	5.09	4.76	4.76	4.76	4.76	4.76	3,850,207	4,042,717	4,244,853	4,457,095	4,679,950	4,913,948
					Persentase peningktan kunjungan wisatawan domestik	10	10	10	10	10	10						
					Persentase peningktan kunjungan wisatawan mancanegara	10.01	10.02	9.99	10.01	10.02	10.03						
					Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang pariwisata pada destinasi / obyek wisata	20	40	60	80	100							

						Persentase pelaku usaha pariwisata yang berdaya saing	1.61	3.22	28.73	30.25	31.76	32.08	
						Persentase tingkat hunian hotel	25.52	27.22	28.73	30.25	31.76	34.94	
						Persentase pengembangan Desa Wisata	12.9	25.81	38.71	51.61	64.52	65.17	

URUSAN : **PERTANIAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3 Meningkatkan Kegiatan Usaha Ekonomi Daerah dengan Memanfaatkan sumber Daya Lokal (sesuai dengan Nawa cita butir Keenam "Meningkatkan produktiofitas masyarakat dan daya saing dengan dacrah lain")	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi					5,62	5,81	5,98	6,15	6,33	6,50	
				3 meningkatnya akses petani terhadap sarana produksi ,modal dan pemasaran	indeks Nilai Tukar Petani		100,89	101,39	101,89	102,39	102,89	103,39	
				4 Terwujudnya diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis ,agroindustri dan agrowisata dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik sektor pertanian	Indeks Produktifitas hasil pertanian		8.69	8.75	9.19	9.44	9.71	10.1	
					Persentase Peningkatan Produksi Padi pertahun		3.14	0.69	1.98	1.27	2.08	0.51	
					Persentase Peningkatan Produksi palawija pertahun		0.48	1.45	1.43	1.29	1.33	1.31	
					Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura pertahun		5.51	0.27	10.15	4.73	4.52	4.32	
					Persentase Pemenuhan sarana pertanian		36.98	38.99	40.46	42.14	43.43	45.35	
					Persentase Luas lahan pertanian yang produktif		79.81	79.49	79.16	78.8	75.5	78.21	
					Persentase Luas lahan pertanian sawah yang produktif		39.7	39.5	39.29	39.02	38.89	38.8	
					Indeks Produktifitas hasil perkebunan		1.28	1.28	1.28	1.27	1.27	1.24	
					Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan pertahun		9,43	1,22	0,58	0,41	0,38	0,58	

						Persentase Luas lahan perkebunan yang produktif	68,56	69,14	69,72	70,34	70,94	72,79	
						Indeks produktifitas hasil hutan	1.2	1.24	1.29	1.34	1.39	1.44	
						Persentase Peningkatan hasil hutan pertahun	5.21	5	4.99	5	5	4.76	
						Persentase Luas hutan rakyat yang produktif	74.3	74.89	75.48	76.09	76.65	77.22	
						Persentase Pendapatan petani Pertahun	26.62	29.07	31.8	34.83	38.21	42.09	

URUSAN : **PERDAGANGAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6 Mewujudkan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata seluruh wilayah dengan menekankan pada pembangunan desa (Termaktub dalam nawa cita butir ketiga "Meneruskan pembangunan kabupaten semarang dari pinggiran dengan memperkuat desa")	Prosentase Kondisi infrastruktur dalam kondisi baik											
				8 Terpenuhinya sarana dan prasarana perdagangan	Persentase peningkatan omset perdagangan								
							Persentase peningkatan ekspor						
						Persentase penurunan barang tidak layak edar							

URUSAN : **PERINDUSTRIAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3 Meningkatkan Kegiatan Usaha Ekonomi Daerah dengan Memanfaatkan	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi					5,62	5,81	5,98	6,15	6,33	6,50	

FUNGSI : **PENANGGULANGAN BENCANA**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4 Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan Sesuai dengan nawa cita kelima "meningkatkan kualitas hidup manusia "			3 terkendalinya pengelolaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan	Persentase ketersediaan desa tangguh bencana		6.14	7.89	9.65	11.4	13.16	14.91	
						Persentase kesiapan masyarakat terhadap Penanganan dan Penanggulangan Bencana	0.47	0.51	0.56	0.6	0.64	0.68	
						Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan dan Penanganan Bencana Daerah	77.78	81.82	84.62	86.67	88.24	89.47	
						Jumlah Area Rawan Bencana yang terpetakan	48.51	48.51	48.51	48.51	48.51	48.51	
						Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi daerah Bencana	33.09	34.29	35.21	36.11	36.99	37.84	

FUNGSI : **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4 Menciptakan Iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi			3 Meningkatnya keamanan dan budaya tertib masyarakat ,penegakan keadilan serta supremasi hukum	Persentase Penurunan Kejadian konflik sosial masyarakat		13.33	15.38	18.18	22.22	42.86	47.15	
						Persentase Pembinaan Politik pada masyarakat	20.45	50.28	70.17	90.06	100	100.00	
						Persentase Pembinaan toleransi kerukunan beragama pada masyarakat	91.64	94.63	96.72	98.51	100	100.00	
						Persentase Pembinaan wawasan kebangsaan pada masyarakat	21.26	40.94	60.63	80.31	100	100.00	

FUNGSI : **PENUNJANG LAINNYA (KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA)**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4 Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan akuntabel (sesuai dengan nawa cita			3 Mantapnya administrasi pemerintahan dalam penerapan informasi communication and teknologi melalui electronic government dalam rangka peningkatan kualitas,pemerataan pelayanan publik dan	Persentase peningkatan indeks mutu pelayanan terhadap masyarakat								
						Persentase Peningkatan Jumlah pelayanan pada kecamatan							

UNSUR : STAF PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4 Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan			2 Meningkatnya disiplin ,kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah sehingga responsif terhadap perubahan paradigma									

UNSUR : PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4 Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan akuntabel (sesuai dengan nawa cita butir ke dua membangun tata kelola pemerintahan			2 Meningkatnya disiplin ,kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan	Persentase Peningkatan fasilitas legalisasi kebijakan daerah	Persentase Peningkatan Kebijakan Daerah yang disahkan	4.76	5.66	6.54	7.41	8.26	9.09	
							66.81	68.16	69.45	71.43	74.16	81.58	

UNSUR : PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target						Keterangan
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4 Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan akuntabel (sesuai dengan nawa cita butir ke dua membangun tata kelola pemerintahan bersih,efektif dan terpercaya)			2 Meningkatnya disiplin ,kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan		Persentase Peningkatan Jumlah SKPD yang mempunyai Kinerja Baik	100	100	100	100	100	100	
						SKPD yang dinilai AKIP baik	38	40	40	40	42	42	
						Persentase Peningkatan Jumlah SKPD yang kinerja Keuangan nya baik	30	25	25	25	25	25	
						Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP secara memadai	0	20	30	30	35	42	
						persentase jumlah temuan eksternal yang internal yang ditindaklanjuti	65	70	75	80	85	90	
						Persentase jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	

UNSUR : PERENCANAAN **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target					Keterangan	
							2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan akuntabel (sesuai dengan nawa cita butir ke dua membangun tata kelola pemerintahan bersih,efektif dan terpercaya)			2 Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahandan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yan g responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal	Persentase Kesesuaian RKPD dengan RPJMD								
					Persentase Kesesuaian RKA SKPD dengan RPJMD								
					Prosentase Kesesuaian Renja SKPD dengan DPA								
					Persentase usulan kegiatan berbasis musrenbang yang tertuang dalam RKPD								

UNSUR : KEPEGAWAIAN **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target					Keterangan	
							2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan akuntabel (sesuai dengan nawa cita butir ke dua membangun tata kelola pemerintahan bersih,efektif dan terpercaya)			2 Meningkatnya disiplin ,kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah sehingga responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan	Persentase Kesesuaian penempatan PNS dalam jabata	87.33	88.11	88.99	89.88	90.78	91.68		
					Persentase aparatur yang mengalami peningkatan kompetensi	3.91	3.95	4.01	4.1	4.21	4.36		
					Persentase pemenuhan kebutuhan diklat pengembangan kompetensi	89.66	90.36	91.88	94.24	97.49	90.79		
					Persentase jabatan struktural yang terisi	97.84	97.94	98.04	98.14	98.24	98.21		
					Persentase peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah yang lulus	99.56	99.58	99.6	99.62	99.64	99.31		
					Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kpegawaaian Bagi Aparatur	99.83	99.83	99.83	99.83	99.83	99.83		
					Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu	99.59	99.59	99.59	99.59	99.59	99.59		
					Persentase Pegawai yang tidak disiplin	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		

UNSUR : KEUANGAN **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator kinerja SKPD	Target					Keterangan	
							2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Mewujudkan	Opini BPK					WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

pelaksanaan Pemerintahan Pelayanan Masyarakat Pembangunan yang efektif,efesien dan akuntabel (sesuai dengan nawa cita butir ke dua membangun tata kelola pemerintahan bersih,efektif dan terpercaya)	Persentase Ketepatan waktu penyusunan pertanggungjawaban keuangan oleh SKPD				100	100	100	100	100	100		
	Meningkatnya kemampuan manajemen pemerintahandan pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal	Persentase peningkatan pendapatan daerah				12.47	6.18	4.17	4.23	4.29	0.5	
		Persentase Peningkatan Retribusi Daerah				4.28	3.09	3.48	2.94	3.01	0.5	
		Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan				4.24	0.07	0.06	0.06	0.06	1	
		Persentase wajib pajak yang membayar PBB tepat waktu				68.41	68.44	68.46	68.47	68.49	68.49	
		Prosentase Peningkatan pendapatan dari pajak daerah				0.61	4.91	5.2	5.24	5.28	0.5	
		Persentase aset yang terkelola dengan baik										
		Persentase penilaian aset				100	100	100	100	100	100	
	Persentase aset yang dihapus				0.008	0.035	0.007	0.007	0.026	0.026		
	Persentase pemanfaatan aset daerah				99.96	99.96	99.96	99.96	99.96	99.96		

butir ke dua membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif dan terpercaya)	pembangunan sistem data	Persentase Partisipasi masyarakat terhadap usulan pembangunan dalam musrenbang tingkat Kecamatan			DISESUAIKAN				
		Persentase Jumlah usulan prioritas pembangunan yang terakomodir							
		Persentase Kehadiran pelaksanaan musrenbang							
		Persentase pembinaan masyarakat							

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN